



**PEMERINTAH
KOTA SALATIGA**



**EVALUASI
RKPD
TRIWULAN IV
TAHUN 2025**



EVALUASI RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TRIWULAN IV

TAHUN 2025

HALAMAN JUDULi

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABELvi

DAFTAR GAMBARvii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. MAKSUD..... 1

1.3. TUJUAN 2

1.4. SISTEMATIKA 2

BAB II PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 3

2.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 3

2.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN 10

2.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 11

2.2.2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025..... 12

2.2.3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2025..... 13

2.2.4. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 untuk Mendukung Kebijakan Nasional 27

2.2.4.1 Kebijakan Penurunan Stunting 27

2.2.4.2 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 29

2.2.4.3 Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 31

2.2.4.4 Dukungan terhadap Penanganan Isu Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 32

2.2.4.5 Penurunan Emisi GRK Kumulatif 33

BAB III EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025..... 35

3.1. PERBANDINGAN ANGGARAN SETIAP OPD DALAM RKPD DAN APBD TAHUN 2025..... 35

3.2. REALISASI PENCAPAIAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM..... 36

3.2.1. REALISASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN..... 36

3.2.2. REALISASI PENCAPAIAN KINERJA SASARAN 41

3.2.3. REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM, FISIK, DAN PENYERAPAN ANGGARAN 50

3.2.3.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR 51

1. Urusan Pendidikan..... 51

2. Urusan Kesehatan..... 51

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	52
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	52
6. Urusan Sosial.....	53
3.2.3.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON	
PELAYANAN DASAR	53
1. Urusan Tenaga Kerja	53
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	53
3. Urusan Pangan	54
4. Urusan Pertanahan	54
5. Urusan Lingkungan Hidup	54
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	55
7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55
8. Urusan Perhubungan	55
9. Urusan Komunikasi dan Informatika.....	56
10. Urusan Koperasi dan UKM	56
11. Urusan Penanaman Modal	56
12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	57
13. Urusan Statistik	57
14. Urusan Persandian.....	57
15. Urusan Kebudayaan.....	57
16. Urusan Perpustakaan	58
17. Urusan Kearsipan.....	58
3.2.3.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	59
1. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	59
2. Urusan Pariwisata	59
3. Urusan Pertanian	59
4. Urusan Perdagangan.....	60
5. Urusan Perindustrian	60
6. Urusan Transmigrasi.....	60
3.2.3.4. URUSAN PENDUKUNG URUSAN	
PEMERINTAHAN	61
1. Sekretariat Daerah	61
2. Sekretariat DPRD	61
3.2.3.5. URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN.....	61
1. Unsur Penunjang Perencanaan	61
2. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan	62
3. Unsur Penunjang Keuangan.....	62
4. Unsur Penunjang Kepegawaian	62
5. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	63

3.2.3.6. URUSAN PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN.....	63
1. Inspektorat	63
3.2.3.7. URUSAN KEWILAYAHAN.....	63
1. Kecamatan	63
3.2.3.8. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	65
3.3. KESELARASAN DAN KONSISTENSI	111
3.3.1. PERBANDINGAN RENCANA PROGRAM YANG TERCANTUM DALAM RPD TAHUN 2023-2026 DENGAN RKPD TAHUN 2025.....	111
3.3.2. PERBANDINGAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KEUANGAN YANG TERCANTUM DALAM RKPD TAHUN 2025 DENGAN APBD PENETAPAN TAHUN 2025	112
 BAB IV ANALISIS DAN PERMASALAHAN	 121
 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	 127
5.1 KESIMPULAN.....	127
5.2 REKOMENDASI.....	128
 BAB VI PENUTUP	 129
 LAMPIRAN FORMULIR E.60 MONEV RKPD TRIWULAN II 2025	 130
1. Dinas Pendidikan	131
2. Dinas Kesehatan	133
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	137
4. DPKP (Perumahan)	139
5. Satpol PP	140
6. BPBD	142
7. Dinas Sosial	143
8. Disperinaker (Tenaga Kerja).....	145
9. DP3APPKB (Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak)	146
10. Dinas Pangan dan Pertanian (Pangan)	148
11. DPKP (Pertanahan)	149
12. Dinas Lingkungan Hidup	150
13. Dukcapil	152
14. DP3APPKB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	153
15. Dinas Perhubungan.....	155
16. Dinas Komunikasi dan Informatika (Komunikasi dan Informatika)	156
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	157
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	159
19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga	160
20. Dinas Komunikasi dan Informatika (Statistik)	161
21. Dinas Komunikasi dan Informatika (Persandian)	162

22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kebudayaan).....	163
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Perpustakaan)	164
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Kearsipan).....	165
25.	Dinas Pangan dan Pertanian (Kelautan dan Perikanan)	166
26.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Pariwisata).....	167
27.	Dinas Pangan dan Pertanian (Pertanian)	168
28.	Dinas Perdagangan	169
29.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perindustrian)	171
30.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Transmigrasi)	172
31.	Sekretariat Daerah	173
32.	Sekretariat DPRD.....	174
33.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Perencanaan).....	175
34.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	176
35.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)	177
36.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Pelatihan)	178
37.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Penelitian dan Pengembangan)	179
38.	Inspektorat Daerah.....	180
39.	Kecamatan Sidorejo	181
40.	Kecamatan Argomulyo.....	182
41.	Kecamatan Tingkir	183
42.	Kecamatan Sidomukti	184
43.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	185

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025	3
Tabel 2. 2	Target Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2025	11
Tabel 2. 3	Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2025 dengan memperhatikan Visi Misi Wali Kota Tahun 2025-2029	16
Tabel 2. 4	Penyandingan Program Pusat, Provinsi Jawa Tengah, dan Program Kota Salatiga Tahun 2025.....	22
Tabel 2. 5	Arah kebijakan, Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Wali Kota Tahun 2025.....	24
Tabel 2. 6	Sinkronisasi Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan serta Program pada Perubahan RKPD Tahun 2025	25
Tabel 3. 1	Pagu Anggaran OPD dalam RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025	35
Tabel 3. 2	Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan TW 4 Tahun 2025	37
Tabel 3. 3	Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran TW 4 Tahun 2025	41
Tabel 3. 4	Capaian Realisasi Anggaran dan Fisik Kegiatan OPD sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 Kota Salatiga.....	66
Tabel 3. 5	Evaluasi Rata – Rata Capaian Kinerja per Urusan Sampai Dengan Triwulan 4 Tahun 2025 Kota Salatiga	68
Tabel 3. 6	Evaluasi Capaian Kinerja Program per Urusan Sampai Dengan Triwulan 4 Tahun 2025 Kota Salatiga	70
Tabel 3. 7	Perbandingan Jumlah Program RPD Tahun 2023-2026 dengan Program Perubahan RKPD Tahun 2025	111
Tabel 3. 8	Perbandingan Jumlah Program pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Program pada APBDP Tahun 2025.....	113
Tabel 3. 9	Perbandingan Jumlah Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Kegiatan Pada APBD Tahun 2025	114
Tabel 3. 10	Perbandingan Sub kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Sub kegiatan APBD Tahun 2025	116
Tabel 3. 11	Perbandingan Jumlah Anggaran Dalam RKPD Tahun 2025 dengan APBD Penetapan Tahun 2025	118

DAFTAR GAMBAR

Diagram 3. 1	Perbandingan Jumlah Program Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 Dengan Jumlah Program Dalam APBD Tahun 2025	114
Diagram 3. 2	Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Kegiatan dalam APBD Tahun 2025	116
Diagram 3. 3	Perbandingan Jumlah Sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Sub kegiatan dalam APBD Tahun 2025	118
Diagram 3. 4	Perbandingan Jumlah Anggaran dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Anggaran dalam APBDP Tahun 2025.....	120

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga merupakan dokumen pendukung dalam pengambilan kebijakan bagi semua stakeholder pembangunan Kota Salatiga terutama untuk Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Salatiga sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap proses perencanaan.

Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD ini akan memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan perencanaan hingga sampai ke tahap pelaksanaan yang pada akhirnya akan dapat memberikan nilai strategis bagi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program atau kegiatan, serta kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahap perencanaan perlu pengendalian pada setiap tahapan, agar mendapatkan capaian sesuai yang diharapkan. Perubahan kondisi serta permasalahan pada evaluasi kinerja pelaksanaan program atau kegiatan yang terjadi sampai dengan triwulan 4 dan antisipasi terhadap perubahan perkembangan yang terjadi sampai akhir tahun anggaran, menjadi salah satu dasar perubahan RKPD tahun berjalan. Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan evaluasi capaian kinerja yang menjadi satu dokumen monitoring dan evaluasi RKPD tahun berjalan yang akan menjadi dasar pengendalian kinerja dan perubahan kebijakan pembangunan guna pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. MAKSUD

Maksud dari penyusunan monitoring dan evaluasi RKPD ini adalah untuk memperoleh gambaran keseluruhan kinerja pembangunan mulai dari proses

perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaksanaan, yang dapat menjadi dasar evaluasi periode berikutnya.

1.3. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan monitoring dan evaluasi RKPD ini adalah untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2025 dan sasaran RPD Tahun 2023- 2026 dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPD Triwulan 4 Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025
BAB III	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025
BAB IV	ANALISIS PERMASALAHAN
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB VI	PENUTUP

BAB II PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

2.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026, arah kebijakan pembangunan tahun 2025 diwujudkan sesuai dengan tema pembangunan tahun 2025, yaitu **“Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Produktif Menuju Salatiga yang Nyaman dan Mandiri”**. Dan tahun 2025 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPD.

Berdasarkan tema tersebut, maka tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Rata-rata Lama Sekolah			Tahun	11,48
	Harapan Lama Sekolah			Tahun	15,46
		Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	97,88
			Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	99,34
			Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	96,82
			Angka Partisipasi (APS) Pendidikan Kesetaraan	%	71,05
	Indeks Literasi Masyarakat			Nilai	63,14
		Mewujudkan masyarakat cerdas dan kreatif	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	21,01
Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Cakupan cagar budaya, sejarah dan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan			%	44,98
		Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Persentase objek pemajuan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	57,97
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	38,57
Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi olahraga			medali	16
		Meningkatnya prestasi dalam olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan			%	23
		Meningkatnya partisipasi pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	4,38

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
	Organisasi Sosial Kemasyarakatan		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	39,5
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Angka Usia Harapan Hidup			Tahun	78,30
		Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	129
			Angka Kematian Bayi	/1.000 KH	11,17
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,07
			Succes Rate TB Kota Salatiga	%	94
			Prevalensi Hipertensi Penduduk Usia diatas 15 tahun	%	38,61
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	100
			Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD		Paripurna
	Laju Pertumbuhan Penduduk			%	1,18
		Mengendalikan pertumbuhan penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	%	2,2
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan per Kapita *PDRB ADHK			%	5,40-6,10
				Juta	57,90
		Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	%	71,67
		Meningkatnya jumlah UKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,78
		Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0,46
			Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	33,5
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	110,18
		Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	7,5
		Meningkatnya kinerja perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4,89
		Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan	Persentase peningkatan wisatawan nusantara	%	113
			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
			Tingkat hunian akomodasi	%	51,42
			Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	9,5
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,16
		Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat	Produktivitas padi	%	6,301
			Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	10
			Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	0,04
			Produktivitas Sapi Perah	%	1,09
			Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6,34
			Peningkatan produksi perikanan (benih)	%	5
			Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100
			Ketersediaan beras	%	100
				%	10,4
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antardaerah dan antarpelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan nilai investasi	Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN	Persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	41,8
			Persentase kenaikan nilai investasi PMDN	%	63,36
			Persentase kenaikan nilai investasi PMA	%	10,5
	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja		%	2,54-3,67
			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	74,92
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja		%	70,85-71,62
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki izin	%	90
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke	%	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
			rencana tenaga kerja		
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS			%	97,03
		Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	92,80
			Angka Kemiskinan	%	4,52–4,24
	Skor Pola Pangan Harapan			Skor	96,60
		Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,57
			Ketersediaan energi per kapita	kcal/kapita	2,812
			Ketersediaan protein per kapita	gram/kapita	110
		Persentase peminat transmigrasi		%	4,07
			Meningkatnya minat untuk menjadi transmigran	%	1
			Persentase peningkatan peminat transmigrasi		
Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Score capaian KLA	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan		Nilai	625
			Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	%	100
			Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%	24
	IDG			Nilai	81
	IPG			Nilai	96
			Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja		41,65
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	80,25
		Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86
			Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	96
			Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	36,5
			Indeks PMPRB	Nilai	-
			Nilai SAKIP	Angka	68
			Indeks Inovasi	Nilai	51,1
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	59
			Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	100
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
			Indeks Profesionalitas ASN	%	79
			Nilai Sistem Merit	%	275
			QA SPIP	Nilai	3,08
			QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2,98
			QA MRI (Manajemen Risiko Indeks)	Nilai	2,94
			Kapabilitas APIP	Level	3
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	89,1
			Indeks SPBE	Nilai	3,26
			Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100
			Tingkat keterbukaan informasi publik	%	100
			Tingkat pengamanan informasi daerah	%	92
			Persentase cakupan akta kelahiran (0-18th)	%	99,46
			Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	98
			Persentase anak 0-17th kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	85,89
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	91
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	63,41
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	97,01
			Persentase PKK Aktif	%	100
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,7
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	93,54

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	65
			Persentase PKK Aktif	%	100
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	92.15
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	73
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	68,18
			Persentase PKK Aktif	%	100
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	63,60
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	90,6
			Persentase PKK Aktif	%	100
			Persentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100
				%	100
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan	Cakupan penanganan ketenteraman kota	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100
			Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100
				%	100
	Penanggulangan Potensi Konflik	Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1,65
				%	100
			Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan	%	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
		menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan publik			
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap bencana			Nilai	3,91
		Meningkatnya persentase Kelurahan tangguh bencana	Kelurahan Tangguh Bencana	%	52,17
			Indeks Risiko Bencana	Nilai	76,52
Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik (%)			%	61,8
		Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	97,5
		Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang	%	98
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Nilai	69,93
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga	Indeks Kualitas Air	Nilai	71,03
			Indeks Kualitas Udara	Nilai	84,76
			Indeks Kualitas Lahan	Nilai	40,63
	Rasio Konektivitas Kota	Meningkatnya keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan		%	0,88
			Rasio Izin Trayek	%	23,59
			Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	22,79
				0,31	
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum		%	83	
Kinerja lalu lintas kota					
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangkat peningkatan kualitas hidup	Persentase rumah yang didukung PSU			%	13
		Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	55
	Pemukiman yang tertata			%	6,62
		Meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh)	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	2,08
		Meningkatnya pengelolaan pertanahan	Persentase luas lahan bersertifikat	%	100
			Penyelesaian kasus tanah negara	%	100

2.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, Sustainable Development Goal's (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga tahun 2023-2026. Penyusunan RKPD tahun 2025 memperhatikan keselerasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Salatiga tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain :

- a. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
- b. Urgensitas penanganan permasalahan pembangunan;
- c. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Selain kriteria tersebut, penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan :

- a. Arah Kebijakan Pembangunan Menengah Kota Salatiga Sebagaimana RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.
- b. Isu strategis.
- c. Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun tingkat nasional.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPD yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas

pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

2.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”.

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intesitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 2 Target Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3 – 5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5 – 5,0
3	Tingkat Kemiskinan	%	7,0 – 8,0
4	Nilai Tukar Petani	Kumulatif	113 – 115
5	Nilai Tukar Nelayan	Kumulatif	104 – 105
6	Rasio Gini	Nilai	0,379 – 0,382
7	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,56
8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	38,6

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif

serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

2.2.2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada tema ***“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”***, yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata.
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan.
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Target sasaran makro pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang akan dicapai antara lain meliputi :

1. PDRB per kapita sebesar 47,60 juta rupiah
2. Angka Kemiskinan sebesar 9,28% - 8,08%
3. Rasio Gini sebesar 0,362
4. Pertumbuhan Ekonomi antara 4,90% - 5,60%

5. Inflasi pada angka $3 \pm 1\%$
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,20% - 4,60%
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,52
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 57,91
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,13
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,50
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,56
13. Indeks Rasio Bencana turun 4%
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00

2.2.3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan arah kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga.

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Penahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan Kota Salatiga tahun 2025 ditujukan untuk ***“Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Produktif Menuju Salatiga yang Nyaman dan Mandiri”***. Keberhasilan pembangunan ditandai dengan pencapaian indikator makro pembangunan daerah.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan tahapan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 maka pada tahun 2025 pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada :

1. Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat.
2. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan.
3. Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak.

4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada sentra-sentra industri dan Kawasan permukiman.
5. Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi.
6. Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
7. Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
8. Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi.
9. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan.

Pengoptimalan Pelaksanaan Program Pendukung Penerapan SPM Kesehatan dan Pendidikan yang mendukung peningkatan daya saing sumber daya manusia tidak menjadi prioritas pembangunan Kota Salatiga pada tahun 2025. Prioritas pembangunan nasional pada transformasi sosial pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, telah dilaksanakan pada tahap pertama RPD Kota Salatiga atau pada tahun 2023 dengan prioritas pada pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Sasaran pembangunan pada tahun 2025 berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan berdasarkan hasil Rakortekbang Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Angka Kemiskinan antara 4,52% - 4,24%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka antara 4,49% - 4,19%
3. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,40% - 6,10%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 85,69
5. Indeks Pembangunan Gender sebesar 96,00
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 56,60
7. Pertumbuhan Nilai Investasi sebesar 10,40%

Prioritas pembangunan Kota Salatiga yang disusun berdasarkan RPD 2023-2026 juga memperhatikan :

1. Prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
Persandingan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah serta prioritas pembangunan Kota Salatiga sebagaimana tersaji dalam tabel 2.3.
2. Upaya penanganan permasalahan dan isu strategis
Sinkronisasi permasalahan, isu strategis, dan program prioritas sebagaimana tersaji dalam tabel 2.4.
3. Upaya mendukung kebijakan nasional antara lain Penerapan SPM, Pembangunan Berkelanjutan, dan Stunting yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Prioritas pembangunan Kota Salatiga diselenggarakan dengan menerapkan berbagai inovasi dalam rangka pengoptimalan pencapaian target kinerja daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah dalam mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kota Salatiga telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Pada tahun 2025 akan dilaksanakan penyusunan Rencana Induk Inovasi Daerah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan inovasi untuk mendukung pencapaian kinerja daerah.

Selain itu diperlukan pula pemetaan kegiatan yang mendukung implementasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan oleh Perangkat Daerah agar hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dapat mendukung perencanaan pemerintah daerah.

Tabel 2. 3 Penyingkapan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2025 dengan memperhatikan Visi Misi Wali Kota Tahun 2025-2029

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPd Tahun 2025	Visi – Misi Wali Kota Salatiga 2025-2029
	PN	Arah Kebijakan			
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Produktif Menuju Salatiga yang Nyaman dan Mandiri	Kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Memperkokoh ideologi Pancasila	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan Berdaya Saing
		Penguatan demokrasi			
		Upaya penegakkan hak asasi manusia			
2	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas	Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
		Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi			
		Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional			
		Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas			
		Meningkatkan Prestasi Olahraga			
3	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Masyarakat adil, makmur, dan harmonis			
		Melestarikan budaya			
		Penanganan bencana			

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	Visi – Misi Wali Kota Salatiga 2025-2029
	PN	Arah Kebijakan			
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Produktif Menuju Salatiga yang Nyaman dan Mandiri	Kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia
4	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan pertahanan negara	Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat	Pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas
		Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan		Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Penyediaan infrastruktur perkotaan yang bertumpu pada tujuan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
		Penguatan keamanan negara		Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada sentra-sentra industry dan kawasan permukiman	
		Profesionalisme dan pelayanan kepolisian			
		Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi			
		Memperkuat keamanan siber, sandi, dan sinyal			
		Pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif			
		Penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy			
		Penguatan diplomasi ekonomi			
		Swasembada pangan, energi, dan air dicapai melalui			

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	Visi – Misi Wali Kota Salatiga 2025-2029
	PN	Arah Kebijakan			
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Produktif Menuju Salatiga yang Nyaman dan Mandiri	Kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia
		pembangunan yang terintegrasi dan memprioritaskan sinergi pemanfaatan sumber daya dan mengurangi trade off melalui pendekatan berkesinambungan (Food, Energy, Water Nexus) Pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global Pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pembangunan rendah karbon, pekerjaan hijau (<i>green jobs</i>), dan ekonomi biru			
5	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan	Melanjutkan pembangunan infrastruktur	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat	Pembangunan Ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM
		Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya		Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan	Penyediaan infrastruktur perkotaan yang bertumpu pada tujuan kesejahteraan

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	Visi – Misi Wali Kota Salatiga 2025-2029
	PN	Arah Kebijakan			
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Produktif Menuju Salatiga yang Nyaman dan Mandiri	Kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia
	Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	masyarakat dan pengentasan kemiskinan
		Penguatan koperasi		Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak	
		Mengembangkan industri kreatif		Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	
		Pendalaman sektor keuangan		Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	
6	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru			
		Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional			
		Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global			
7	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Membangun desa dan membangun dari desa			
		Pemerataan ekonomi			
		Memberantas kemiskinan			
8	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan	Reformasi politik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan public yang berkualitas melalui peningkatan
		Reformasi hukum			
		Reformasi tata kelola pemerintahan yang didukung			

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	Visi – Misi Wali Kota Salatiga 2025-2029
	PN	Arah Kebijakan			
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Produktif Menuju Salatiga yang Nyaman dan Mandiri	Kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia
	Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik			teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur
		Tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045			
		Optimalisasi Pendapatan Negara ditujukan untuk penerimaan perpajakan dan non-perpajakan sehingga dapat menyediakan ruang fiskal yang lebih memadai untuk mencapai sasaran pembangunan			
		Peningkatan harmonisasi kebijakan moneter fiskal, sektor keuangan dan sektor riil sebagai stabilisator perekonomian sekaligus juga sebagai stimulator pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia			
		Pencegahan dan pemberantasan narkoba,			

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	Visi – Misi Wali Kota Salatiga 2025-2029
	PN	Arah Kebijakan			
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Produktif Menuju Salatiga yang Nyaman dan Mandiri	Kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia
		penanggulangan judi dan penyelundupan			
		Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, Tenaga Kerja Indonesia, dan keamanan insani			
		Penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara ditujukan untuk menciptakan Manajemen Badan Usaha Milik Negara yang professional dan berintegritas serta bebas dari kepentingan politik praktis			

Tabel 2. 4 Penbandingan Program Pusat, Provinsi Jawa Tengah, dan Program Kota Salatiga Tahun 2025

No.	Program Hasil Terbaik Cepat	Program Jawa Tengah	Program Salatiga
1	Memberikan makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	Percepatan penanganan stunting melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil	PROGRAM SEHATI: Salatiga Sehat Terlindungi
			• Layanan pendampingan tenaga medis di saat kehamilan, kelahiran dan nifas.
			• Layanan Kesehatan Ibu bebas Anemia dan Terpenuhi Nutrisi
			• Layanan Jaminan Kesehatan bayi periode 1000 HPK menuju Salatiga Zero Stunting.
2	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten	Pap Smear gratis	PROGRAM SEHATI : Salatiga Sehat Terlindungi
		Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	• Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
		Puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dan pelayanan kesehatan di setiap desa	• Meningkatkan fasilitas Kesehatan dan Menyiapkan Tenaga Medis Profesional untuk RSUD berstandar internasional.
		Mendorong penyediaan 1 Desa/Kelurahan 1 setiap Puskesmas Pembantu	
3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	Mendorong pembangunan desa berdaya (lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, dan Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana)	• Meningkatkan infrastruktur distribusi pangan untuk memastikan kelancaran aliran pangan dari produsen ke konsumen
		Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi	• Pengembangan jaringan pasar daerah sebagai pusat distribusi pangan lokal.
4	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerjasama dengan pihak sekolah swasta	PROGRAM SALATIGA CERDAS Meningkatkan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik, dan bahan ajar pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional
5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilennial untuk membuka lapangan kerja	PROGRAM JARKOM MABAR
			Penyaluran bantuan Insentif/Penambahan Modal Kerja sebesar Rp10 juta untuk 1.000 usaha rintisan/startup, yang sudah melalui fase inkubator bisnis.
			PROGRAM SEKAR : Salatiga Berkarya Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan lokal melalui pendampingan UMKM

No.	Program Hasil Terbaik Cepat	Program Jawa Tengah	Program Salatiga
6	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) TNI/POLRI, dan pejabat negara	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan Guru, ASN, program agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, Penghafal Quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	Peningkatan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirausahaan berorientasi global
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersubsidi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Infratraktur dan Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni	PROGRAM BIRULAH : Bangun Rumah Layak Huni
		Subsidi Pangan Murah	Program bantuan sosial untuk pemugaran rumah tangga miskin untuk mendapatkan rumah yang sehat
		Fasilitas rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan swasta	PROGRAM STBM
		Taruna karya mandiri melalui program kartu zilennial untuk membuka lapangan kerja	Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pemberian bantuan keuangan kelurahan/RW untuk merubah perilaku hygiene dan membangun sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat
8	Mendirikan Badan Penerimaan negara daerah untuk memaksimalkan penerimaan negara terhadap pendapatan bruto (PDB) ke 23%	Membentuk Biro Pembinaan BUMD dan Pemanfaatan Aset Daerah, membentuk UPTD Pengelolaan Aset, Riset Potensi Probis dan BUMD, Riset Potensi Daerah serta Sumber Daya, Transparansi Tata Kelola Tambang Galian C, Transparansi Tata Kelola CSR untuk meningkatkan PAD Daerah	PROGRAM SEKAR : Salatiga Berkarya
			Optimalisasi aset Pemerintah Kota Salatiga dan revitalisasi BUMD menjadi lebih produktif berkolaborasi dengan investasi swasta

Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka pada Perubahan RKPD Kota Salatiga telah menyelaraskan dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan Kepala Daerah terpilih dengan program prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan Kepala Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Arah kebijakan, Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Wali Kota Tahun 2025

No.	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Unggulan	Aktivitas
1	Penataan sarana prasarana publik, khususnya jalan sehingga berstandar pelayanan inklusif	Penyediaan infrastruktur perkotaan yang bertumpu	Program SARI (Salatiga Lestari)	Peningkatan kualitas jalan se-Kota Salatiga
2	Pemenuhan sarana produksi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah	Pembangunan Ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM	Program SARI (Salatiga Lestari)	Penyediaan sarana produksi <i>Smart Urban Farming</i>
3	Pengembangan dan pemberdayaan UMKM	Pembangunan Ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM	Program SEKAR (Salatiga Berkarya)	Digitalisasi Koperasi, Pengembangan Koperasi Merah Putih, Pengembangan UMKM
			Program JARKOM MABAR (Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda Berwirausaha)	Link and match mahasiswa, inkubator bisnis
4	Penyediaan jaringan online terpadu yang berpusat pada Command Center	Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsive terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur	Program SOS (Salatiga Online System)	Pembangunan infrastruktur pendukung jaringan online yang terpadu untuk pelayanan public
5	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi rumah yang sehat	Pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas	Program BIRULAH (Bangun Rumah Layak Huni)	Pembangunan RTLH di kawasan kumuh
6	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas unggul dan berdaya saing melalui lintas masyarakat	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Program Salatiga Cerdas	Fasilitasi kegiatan Bunda Literasi

Tabel 2. 6 Sinkronisasi Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan serta Program pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Pagu Prioritas Pembangunan Tahun 2025			Program Pendukung	Pagu Program Pendukung Tahun 2025			Perangkat Daerah
		RKPD	APBD	PRKPD		RKPD	APBD	PRKPD	
1. Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur untuk masyarakat	1. Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat	Rp16.900.000.000	Rp22.121.750.000	Rp22.121.750.000	1. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp16.900.000.000	Rp22.121.750.000	Rp22.121.750.000	DPUPR
	2. Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak	Rp3.823.964.000	Rp17.169.430.000	Rp17.169.430.000	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp3.823.964.000	Rp17.169.430.000	Rp17.169.430.000	DPUPR
	3. Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Rp3.952.392.196	Rp13.125.065.365	Rp13.125.065.365	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp3.952.392.196	Rp13.125.065.365	Rp13.125.065.365	Dishub
	4. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Rp620.000.000	Rp626.928.925	Rp626.928.925	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp620.000.000	Rp626.928.925	Rp626.928.925	DPUPR
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	5. Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi, dan pengembangan investasi	Rp2.540.682.000	Rp5.058.815.125	Rp5.061.872.557	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Rp693.000.000	Rp2.029.247.300	Rp1.132.304.732	Dinkop UMKM
					2. Program Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi	Rp195.000.000	Rp198.551.999	Rp198.551.999	Dinkop UMKM
					3. Program Pengembangan UMKM	Rp374.212.000	Rp444.051.000	Rp444.051.000	Dinkop UMKM
					4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp1.177.600.000	Rp2.186.094.826	Rp2.086.094.826	Disdag
					5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp100.870.000	Rp200.870.000	Rp200.870.000	DPMPSTP
3. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	6. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Rp31.456.800.500	Rp27.112.449.553	Rp28.075.943.861	1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp941.609.500	Rp1.301.746.900	Rp1.301.746.900	Bappeda
					2. Program Perlindungan Jaminan Sosial	Rp944.851.000	Rp1.212.640.000	Rp1.212.640.000	Dinsos

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Pagu Prioritas Pembangunan Tahun 2025			Program Pendukung	Pagu Program Pendukung Tahun 2025			Perangkat Daerah
		RKPD	APBD	PRKPD		RKPD	APBD	PRKPD	
					3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.29.570.340.000	Rp24.598.062.653	Rp24.598.062.653	Kecamatan
4. Pengelolaan lingkungan hidup dan penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat	7. Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan, yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat	Rp3.851.600.000	Rp18.198.544.000	Rp18.225.295.000	1. Program Kawasan Permukiman	Rp3.851.600.000	Rp18.198.544.000	Rp18.225.295.000	DPKP
	8. Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Rp10.752.250.054	Rp11.616.177.857	Rp11.616.177.857	1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp7.552.250.054	Rp3.793.654.857	Rp3.793.654.857	DPKP
					2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp1.450.000.000	Rp2.151.509.000	Rp2.151.509.000	DPUPR
					3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp1.750.000.000	Rp5.671.014.000	Rp5.671.014.000	DPUPR
	9. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman	Rp1.996.276.200	Rp6.255.572.585	Rp6.255.572.585	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp409.819.200	Rp883.751.720	Rp883.751.720	DLH
					2. Program Pengelolaan Persampahan	Rp1.526.457.000	Rp5.335.740.225	Rp5.335.740.225	DLH
					3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp60.000.000	Rp36.080.640	Rp36.080.640	Disperinaker

2.2.4. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 untuk Mendukung Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan Kota Salatiga tahun 2025 juga berkorelasi dengan Strategi Nasional antara lain Penurunan Stunting, Standar Pelayanan Minimal, Sustainable Development Goal's (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

2.2.4.1 Kebijakan Penurunan Stunting

Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045 merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi pada perencanaan pembangunan pada tahun 2025. Sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penurunan stunting dilaksanakan dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan perwujudan peran serta pemerintah dalam penurunan stunting yang terdiri dari :

- a. Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting;
- b. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal secara maksimal;
- c. Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target nasional;
- d. Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- e. Meningkatkan alokasi dan efektivitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting;
- g. Untuk penurunan stunting pemerintah daerah melaksanakan 8 aksi konvergensi;
- h. Melibatkan peran multi sektor termasuk non pemerintahan dalam upaya penurunan stunting.

Sebagai salah satu bentuk penguatan integrasi perencanaan daerah terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan merujuk Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tentang Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, maka dalam RKPD tahun 2025, Pemerintah Kota Salatiga tetap mengalokasikan

perencanaan terkait hal tersebut. Perpres ini masih menjadi payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 13,5% di tahun 2025 dan 5% di tahun 2045. Upaya pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yang meliputi :

- a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
- b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
- d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
- e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting, dengan melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting, yaitu :

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pada tahun 2025, untuk mendukung target penurunan stunting tersebut, perencanaan pembangunan Kota Salatiga merupakan strategi pada upaya menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat,

peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI eksklusif serta kerja sama lintas sektoral untuk penanganan stunting.

Prevalensi Stunting pada Balita menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada bidang kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi untuk penanganan stunting dilakukan dengan berbagai inovasi penanganan stunting.

Perencanaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan kegiatan lintas sektoral menjadi salah satu wujud keterlibatan Pemerintah Kota Salatiga dalam penanganan stunting guna mendukung percepatan penurunan stunting secara nasional. Adapun program-program pendukung pencapaian target tersebut adalah :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- e. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- f. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- g. Program Pemberdayaan Sosial;
- h. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- i. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- j. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- k. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- l. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.2.4.2 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Sebagaimana amanat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta dengan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka pada tahun 2025 Kota Salatiga telah memprioritaskan pemenuhan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kuantitas dan kualitas layanan). Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Sedangkan Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Pada SPM bidang Pendidikan, prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, Dikdas, dan pendidikan non formal serta peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi Pedagogik guru PAUD, SD, dan SMP. Prioritas pembangunan tersebut untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.

Penerapan SPM bidang Kesehatan, untuk tahun 2025 difokuskan pada peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1.000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan difokuskan pada penanganan penyakit menular (Covid19, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat. Prioritas tersebut dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan menuju derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi prioritas pembangunan tahun 2025 yang akan mendukung penerapan SPM bidang Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat. Arah kebijakan untuk penerapan SPM tersebut diarahkan ada peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan penerapan SPM bidang Pekerjaan

Umum adalah meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik, sedangkan sasaran pembangunan pada penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh), dengan menggunakan strategi penerapan pada pemenuhan jenis dan mutu SPM.

Pemenuhan SPM bidang Sosial pada tahun 2025 dilaksanakan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan pada pemantapan program-program penanggulangan kemiskinan.

Pemenuhan SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diwujudkan dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan. Strategi penerapan SPM bidang trantibunlinmas dengan pemenuhan pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, informasi rawan bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

2.2.4.3 Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam rangka konteks perencanaan pembangunan daerah, upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) merupakan hal yang sangat strategis, tidak hanya dikaitkan dengan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, akan tetapi juga diintegrasikan dengan potensi daerah yang dikaitkan dengan data di tingkat basis. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan, maupun pemetaan terhadap potensi dan permasalahan merupakan suatu keharusan.

Pada tahun 2025, prioritas pembangunan diarahkan pada hasil evaluasi capaian SDG's tahun 2023. Selanjutnya dilaksanakan sinkronisasi indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan dokumen perencanaan daerah. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan (*goal*) berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

2.2.4.4 Dukungan terhadap Penanganan Isu Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Dukungan Pemerintah Kota Salatiga pada arah kebijakan nasional untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan pendukung pasca/setelah pelaksanaan pemilu tahun 2024, yaitu:

- a. Pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat;
- b. Pembinaan forum kerukunan umat beragama;
- c. Gerakan kemitraan Bersama organisasi, kemasyarakatan sipil, dan perguruan tinggi menyukseskan pemilu serentak tahun 2024;
- d. Pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOMPIMCAM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- e. Pembumian nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;
- f. Forum komunikasi sosial politik;
- g. Pembentukan dan operasionalisasi tim pemantauan dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan dan tahapan pemilu serentak 2024;
- h. Peningkatan kapasitas ASN dan anggota FKDM dalam rangka deteksi dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Selain itu, salah satu bentuk dukungan lain dari Pemerintah Kota Salatiga adalah pada fasilitasi pelaksanaan Pilkada meliputi pendanaan Pilkada serentak sesuai Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari APBD melalui mekanisme hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun program pendukung pasca pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah :

- a. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

2.2.4.5 Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Isu perubahan iklim menjadi perhatian utama karena mencakup kebencanaan dan juga terkait dengan sektor energi dan pangan sebagai sektor yang terdampak langsung. Energi menjadi sorotan mengingat sektor ini menyumbang gas rumah kaca (GRK) yang turut berkontribusi pada pemanasan global. Gangguan terhadap cuaca yang semakin tidak terprediksi, mengganggu panen dan produksi bahan pangan. Perubahan iklim juga terkait dengan pemanasan global dan juga isu keadilan iklim. Peningkatan emisi gas rumah kaca diakibatkan karena berbagai permasalahan antara lain, alih fungsi lahan, aktivitas pertanian dan peternakan yang tidak ramah lingkungan, penggunaan energi fosil berlebihan, serta limbah domestik yang tidak terkelola, terlebih adanya peningkatan jumlah penduduk serta tingginya mobilitas masyarakat yang mempengaruhi perubahan iklim.

Target penurunan Emisi GRK Kumulatif menjadi salah satu kebijakan RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 yang selanjutnya ditetapkan dalam target kinerja mendukung Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD 2025-2045. Penetapan target berdasarkan angka proyeksi sementara penurunan emisi GRK dalam skenario ambisius yang diterapkan oleh BAPPENAS dalam pemodelan dinamika sistem yang menggambarkan penerapan beragam bentuk kebijakan pembangunan rendah karbon yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota, dan pihak non pemerintah.

Kontribusi Kota Salatiga untuk Pembangunan Rendah Karbon dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menurunkan emisi GRK, diintervensi melalui pengelolaan TPS3R, Bank Sampah, pembangunan IPAL/SPALD-Terpusat/SPALD-Setempat, dan pembangunan tangki septik skala individual. Pada sektor energi, dilaksanakan kegiatan efisiensi energi

penggunaan lampu, efisiensi energi penggunaan PJU, pembangunan energi terbarukan.

Kebijakan pemerintah untuk menurunkan ketergantungan masyarakat atas penggunaan kendaraan bermotor, di antaranya melalui *Car Free Day*, Reformasi Sistem Transit (BRT System), *Intelligent Transportation System* (ITS)/*Area Traffic Control System* (ATCS), penerapan pengendalian dampak lalu lintas yang bertujuan mengurangi tingkat pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor.

BAB III EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

3.1. PERBANDINGAN ANGGARAN SETIAP OPD DALAM RKPD DAN APBD TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 tahun 2025 tanggal 26 Juni 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, ditetapkan pagu indikatif untuk perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Salatiga adalah sebesar Rp1.112.589.534.731,00. Sedangkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 41 Tahun 2025, tanggal 1 Desember 2025, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2025 tanggal 10 September 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perencanaan anggaran pembangunan daerah Pemerintah Kota Salatiga adalah sebesar Rp1.134.849.392.788,00 dengan rincian anggaran per Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Pagu Anggaran OPD dalam RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025

NO	OPD	RKPD 2025	APBD 2025
1	Dinas Pendidikan	214.677.074.021	216.062.728.021
2	Dinas Kesehatan	347.586.641.893	351.202.044.675
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.405.477.122	92.770.590.022
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	33.411.004.509	32.960.004.509
5	Satuan Polisi Pamong Praja	14.888.878.877	13.888.878.877
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.460.701.853	4.460.701.853
7	Dinas Sosial	8.918.915.495	8.818.915.495
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.786.349.709	10.786.349.709
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.649.291.678	11.855.187.678
10	Dinas Lingkungan Hidup	33.543.555.194	34.049.631.268
11	Dinas Pangan dan Pertanian	14.722.599.266	14.722.599.266
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.120.973.609	8.120.973.609
13	Dinas Perhubungan	21.376.861.375	21.386.861.375
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.613.801.491	14.513.801.491
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.915.197.246	8.145.197.246

NO	OPD	RKPD 2025	APBD 2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.972.689.481	5.105.771.791
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	21.212.595.371	21.512.595.371
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.065.950.237	8.590.950.237
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.818.933.473	9.818.933.473
20	Dinas Perdagangan	14.656.765.385	14.903.248.388
21	Sekretariat Daerah	39.992.584.544	40.023.649.244
22	Sekretariat DPRD	42.202.741.263	50.186.775.263
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.308.613.326	10.108.613.326
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	34.257.519.714	33.301.072.002
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.049.840.699	10.949.840.699
26	Inspektorat Daerah	9.501.044.148	9.301.044.148
27	Kecamatan Sidorejo	17.776.229.018	17.276.229.018
28	Kecamatan Tingkir	19.579.620.926	19.279.620.926
29	Kecamatan Argomulyo	17.391.496.070	17.320.996.070
30	Kecamatan Sidomukti	13.480.940.810	13.280.940.810
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.244.646.928	10.144.646.928
	JUMLAH	1.112.589.534.731	1.134.849.392.788

Perbedaan penetapan pagu pada RKPD dan APBD tahun 2025 dipengaruhi oleh penyesuaian proyeksi pendapatan dan akomodir usulan belanja OPD pada saat pembahasan KUA PPAS dan RAPBD tahun 2025.

3.2. REALISASI PENCAPAIAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

Realisasi pencapaian kinerja tujuan, sasaran, dan program, dalam mencapai kinerja per urusan dari setiap Perangkat Daerah sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebagai berikut :

3.2.1. REALISASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Realisasi pencapaian target indikator kinerja tujuan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan TW 4 Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Kategori
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,48	11,49	107,48	Sangat Tinggi
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,46	15,47	100,13	Sangat Tinggi
3.	Indeks Literasi Masyarakat	Nilai	63,14	63,14	100,00	Sangat Tinggi
4.	Cakupan cagar budaya, sejarah dan objek pemjuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	44,98	56,52	125,66	Sangat Tinggi
5.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	16	76	475,00	Sangat Tinggi
6.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	23	18,53	80,57	Tinggi
7.	Angka Harapan Hidup	Angka	78,08	78,75	100,86	Sangat Tinggi
8.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,30	1,24	95,38	Sangat Tinggi
9.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,40-6,10	5,98	104,00	Sangat Tinggi
10.	Pendapatan per kapita *PDRB ADHK	Juta	57,90	61,02	105,39	Sangat Tinggi
11.	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	10,40	76,91	739,52	Sangat Tinggi
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,54-3,67	3,67	100,00	Sangat Tinggi
13.	Angka Kemiskinan	%	4,52-4,24	4,2	95,89	Sangat Tinggi
14.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,85-71,62	70,93	99,57	Sangat Tinggi
15.	Cakupan Penduduk Memenuhi Kriteria yang terdata dalam DTKS	%	97,03	97,89	100,88	Sangat Tinggi
16.	Pola Pangan Harapan	Nilai	96,60	92,73	95,99	Sangat Tinggi
17.	Persentase Peminat Transmigrasi	%	4,07	88,89	2.184	Sangat Tinggi
18.	Score Capaian KLA	Nilai	625	682,21	109,15	Sangat Tinggi
19.	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Nilai	81,00	65,05	80,31	Tinggi
20.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Nilai	96,00	95,59	99,57	Sangat Tinggi
21.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80,25	81,00	100,93	Sangat Tinggi

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Kategori
22.	Cakupan Penanganan Ketenteraman Kota	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
23.	Penanggulangan Potensi Konflik	%	100	87,5	87,5	Tinggi
24.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Nilai	3,91	0,51	13,04	Sangat Rendah
25.	Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik	%	61,80	61,80	100,00	Sangat Tinggi
26.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	69,93	68,70	98,24	Sangat Tinggi
27.	Rasio Konektivitas Kota	%	0,88	0,88	100,00	Sangat Tinggi
28.	Rasio Lalu Lintas Kota	Rasio	0,31	0,23	125,81	Sangat Tinggi
29.	Persentase Rumah yang Di dukung oleh PSU	%	13	13,45	106,46	Sangat Tinggi
30.	Pemukiman yang Tertata	%	6,62	6,87	103,77	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja					201,12	

Keterangan : (*) Realisasi triwulan 4 tahun 2024

Kategori : $N \leq 50$ = Sangat Rendah

$51 < N < 66$ = Rendah

$66 \leq N < 76$ = Sedang

$76 \leq N \leq 90$ = Tinggi

$N > 90$ = Sangat Tinggi

Rata-rata tingkat capaian indikator kinerja tujuan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 201,12. Rata-rata ini masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Pencapaian ini didukung oleh beberapa hal :

1. Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
2. Adanya kebutuhan tenaga kerja terampil dalam lapangan pekerjaan bidang kejuruan dan teknologi.
3. Ketersediaan sarana prasarana literasi seperti taman literasi, perpustakaan di Taman Cerdas dan perluasan perpustakaan daerah.
4. Ketersediaan perpustakaan elektronik dalam bentuk virtual library dan bacaan dalam bentuk e-book.
5. Adanya dukungan pemerintah Kota Salatiga, kerja sama yang baik dengan para stakeholder, dan kepedulian masyarakat terhadap cagar budaya, peninggalan sejarah, dan objek pemajuan budaya.
6. Banyaknya kejuaraan yang diikuti sehingga meningkatkan prestasi dan perolehan penghargaan bidang olahraga.
7. Adanya kerjasama dengan semua kelurahan dalam pelaksanaan pendataan pemuda dan melibatkan organisasi kepemudaan yang ada.
8. Adanya peningkatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dalam pelayanan Keluarga Berencana.
9. Adanya swalayan dan fasilitas perdagangan lainnya yang berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.
10. Adanya perusahaan di Kota Salatiga yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas perdagangan.
11. Adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
12. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.
13. Perluasan kerja sama pemerintah dan pelaku industri, yang memberi peluang lebih besar dalam penempatan kerja.
14. Akses informasi pasar kerja yang lebih baik, termasuk penggunaan sistem digital dan job-portal.
15. Adanya pertumbuhan lapangan kerja yang menarik minat masyarakat untuk bekerja.
16. Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, sehingga meningkatkan kesiapan masyarakat untuk dapat masuk ke pasar kerja.

17. Adanya dukungan lintas sektor terkait pangan, seperti kegiatan pemanfaatan pekarangan, pengadaan pangan lokal, dan pengembangan komoditi non beras.
18. Adanya sosialisasi dan penyampaian informasi yang jelas mengenai peluang, manfaat, serta fasilitas di lokasi transmigrasi.
19. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di kawasan transmigrasi, seperti rumah, lahan usaha, akses pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
20. Telah dilakukan upaya dalam peningkatan pemenuhan hak-hak anak.
21. Telah dilakukan upaya dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dari berbagai aspek.
22. Adanya peningkatan kualitas air (IKA), dan kualitas tutupan lahan (IKL), dengan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam hal pembinaan, pengawasan ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup, peningkatan tutupan lahan (ruang terbuka hijau), dan program kegiatan pendukung lainnya.
23. Jumlah trayek transportasi umum yang dilayani masih memenuhi jumlah trayek yang dibutuhkan.
24. Adanya upaya peningkatan layanan angkutan dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, pengelolaan terminal, uji layak kendaraan dan sosialisasi kepada masyarakat umum.

Walaupun tingkat capaian indikator kinerja tujuan masuk dalam kategori Sangat Tinggi, namun masih ada indikator kinerja tujuan yang masuk dalam kategori Sangat Rendah, yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap bencana.

Hal ini disebabkan diantaranya karena :

1. Penilaian indikator kinerja dilakukan pada akhir tahun dan belum ada rilis data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat.
2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan mitra kerja.
3. Perencanaan yang kurang matang.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten.
5. Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi waktu terjadinya.

3.2.2. REALISASI PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Realisasi pencapaian target indikator kinerja sasaran sampai dengan Triwulan 4 tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3. sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran TW 4 Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
A.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,00	86,32	100,30	Sangat Tinggi
2.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	55,00	56,29	102,35	Sangat Tinggi
3.	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,57	1,57	100,00	Sangat Tinggi
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	85,87	86,23	100,42	Sangat Tinggi
5.	Angka Kemiskinan	Angka	4,52-4,24	4,20	95,89	Sangat Tinggi
6.	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,07	0,0245	40,81	Sangat Rendah
B.	Aspek Daya Saing Daerah					
7.	Indeks SPBE	Nilai	3,26	4,11	126,07	Sangat Tinggi
8.	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	97,50	89,79	121,34	Sangat Tinggi
C.	Aspek Pelayanan Umum					
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
	Pendidikan					
1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	%	97,88	97,00	99,10	Sangat Tinggi
2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	%	99,34	99,30	99,96	Sangat Tinggi
3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	%	96,82	96,81	99,99	Sangat Tinggi
4.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	%	71,05	77,31	108,82	Sangat Tinggi
	Kesehatan					
5.	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	129	50,00	161,24	Sangat Tinggi
6.	Angka Kematian Bayi	/1.000 KH	11,17	11,50	73,80	Sedang
7.	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,07	0,0245	40,81	Sangat Rendah

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
8.	Success Rate TB	%	94	78,96	86,44	Sangat Tinggi
9.	Prevalensi hipertensi penduduk usia diatas >15 tahun	%	38,61	33,60	112,72	Sangat Tinggi
10.	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
11.	Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
12.	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	98	95,21	97,15	Sangat Tinggi
13.	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	97,5	93,32	96,73	Sangat Tinggi
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
14.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	2,08	0,35	183,17	Sangat Tinggi
15.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	55	56,29	102,34	Sangat Tinggi
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat						
16.	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
17.	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
18.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1,65	0,85	150,29	Sangat Tinggi
19.	Terselesaikannya kasus konflik horizontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
20.	Kelurahan Tangguh Bencana	%	52,17	21,73	41,65	Sangat Rendah
21.	Indeks Risiko Bencana	%	75,60	80,38	106,32	Sangat Tinggi
Sosial						
22.	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	92,80	97,95	105,55	Sangat Tinggi
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar						
Tenaga Kerja						
23.	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki izin	%	90	68,00	75,56	Tinggi
24.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	74,92	79,38	105,95	Sangat Tinggi
25.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	110,18	104,297	94,66	Sangat Tinggi
26.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak					
27.	Persentase kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
28.	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	41,65	40,72	97,77	Sangat Tinggi
	Pangan					
29.	Ketersediaan beras (rasio cadangan beras setahun dibandingkan dengan target)	%	100	267,67	267,67	Sangat Tinggi
30.	Ketersediaan energi per kapita	kcal/ kapita	2,812	2,796	112,42	Sangat Tinggi
31.	Ketersediaan protein per kapita	gram/ kapita	110	78,66	71,51	Sedang
32.	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,57	1,57	100,00	Sangat Tinggi
	Pertanahan					
33.	Penyelesaian kasus tanah negara	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
34.	Persentase luas lahan bersertifikat	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	Lingkungan Hidup					
35.	Indeks Kualitas Air	Nilai	71,03	73,76	103,84	Sangat Tinggi
36.	Indeks Kualitas Udara	Nilai	84,76	75,97	89,63	Tinggi
37.	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	40,63	46,55	114,57	Sangat Tinggi
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
38.	Persentase cakupan akta kelahiran (0-18th)	%	99,46	99,53	100,64	Sangat Tinggi
39.	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	98	98,27	100,28	Sangat Tinggi
40.	Persentase anak 0-17th kurang dari 1 hari yang memiliki KIA	%	85,89	87,29	101,99	Sangat Tinggi
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
41.	TFR (Total Fertility Rate)	%	2,20	2,20	100,00	Sangat Tinggi
42.	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%	24	8,00	33,33	Sangat Rendah
	Perhubungan					
43.	Rasio Izin Trayek	%	23,59	22,26	94,36	Sangat Tinggi
44.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	22,79	18,97	83,24	Tinggi
45.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	83	78,06	94,05	Sangat Tinggi
	Komunikasi dan Informatika					

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
46.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	%	100,00	94,78	94,78	Sangat Tinggi
47.	Indeks SPBE	Nilai	3,26	4,11	126,07	Sangat Tinggi
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
48.	Persentase koperasi aktif	%	71,67	63,57	88,71	Sangat Tinggi
49.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,78	99,87	100,09	Sangat Tinggi
	Penanaman Modal					
50.	Persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	41,8	24,93	59,64	Rendah
51.	Persentase kenaikan nilai investasi PMDN	%	63,36	160,67	253,58	Sangat Tinggi
52.	Persentase kenaikan nilai investasi PMA	%	10,5	5,6	53,33	Rendah
	Kepemudaan dan Olahraga					
53.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	4,38	1,03	23,52	Sangat Rendah
54.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	39,50	36,03	91,22	Sangat Tinggi
55.	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
	Statistik					
56.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	Persandian					
57.	Tingkat pengamanan informasi daerah	%	92	82,00	89,13	Tinggi
	Kebudayaan					
58.	Persentase objek pemajuan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	57,97	76,81	132,50	Sangat Tinggi
59.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	38,57	46,38	120,25	Sangat Tinggi
	Perpustakaan					
60.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	21,01	21,01	100,00	Sangat Tinggi
	Kearsipan					
61.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional	%	89,10	90,16	101,19	Sangat Tinggi
	Urusan Pemerintahan Pilihan					
	Kelautan dan Perikanan					

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
62.	Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6,34	9	150	Sangat Tinggi
63.	Peningkatan produksi perikanan (benih)	%	5	1	20,00	Sangat Rendah
	Pariwisata					
64.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	113	113,52	100,46	Sangat Tinggi
65.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	100	123,45	123,45	Sangat Tinggi
66.	Tingkat hunian akomodasi	%	51,42	52,2	101,52	Sangat Tinggi
67.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	9,5	7,92	83,37	Tinggi
68.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,16	0,18	114,15	Sangat Tinggi
	Pertanian					
69.	Produktivitas padi	%	6,301	6,307	100,10	Sangat Tinggi
70.	Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	10	-19,01	-190,1	Sangat Rendah
71.	Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	0,04	0,12	300,00	Sangat Tinggi
72.	Produktivitas sapi perah	%	1,09	3	275,23	Sangat Tinggi
73.	Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
	Perdagangan					
74.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	4,89	4,89	100,00	Sangat Tinggi
	Perindustrian					
75.	Persentase pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0,46	0,55	119,57	Sangat Tinggi
76.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	33,50	33,1	98,81	Sangat Tinggi
	Transmigrasi					
77.	Persentase peningkatan peminat transmigrasi	%	1	700	7.000	Sangat Tinggi
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
	Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan					
78.	Indeks Inovasi	Nilai	51,10	48,88	95,66	Sangat Tinggi
79.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	%	59	73,68	124,88	Sangat Tinggi
80.	Penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD	%	100	96,67	96,67	Sangat Tinggi
	Kuangan					
81.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	Sangat Tinggi

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
82.	Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan	%	7,50	2,77	36,69	Sangat Rendah
	Kepegawaian					
83.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	79	82,14	103,97	Sangat Tinggi
84.	Nilai Sistem Merit	Nilai	275	274,5	96,32	Sangat Tinggi
	Fungsi Penunjang Lainnya					
	Pengawasan					
85.	Kapabilitas APIP	Level	3	2,34	78,00	Tinggi
86.	QA SPIP	Nilai	3,08	2,921	94,34	Sangat Tinggi
87.	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2,98	2,910	97,51	Sangat Tinggi
88.	QA MRI (Manajemen Risiko Indeks)	Nilai	2,94	2,853	97,04	Sangat Tinggi
	Sekretariat DPRD					
89.	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	98,75	98,75	Sangat Tinggi
	Sekretariat Daerah					
90.	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	96	98,15	102,24	Sangat Tinggi
91.	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	36,5	37,16	102,00	Sangat Tinggi
92.	Indeks PMPRB	Nilai	71,00	0,00	0,00	Sangat Rendah
93.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	81,35	81,00	99,57	Sangat Tinggi
94.	Nilai SAKIP	Angka	68	66,54	97,85	Sangat Tinggi
95.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	86,32	100,30	Sangat Tinggi
	Kecamatan					
	Kecamatan Sidomukti					
96.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	91,00	90,40	99,34	Sangat Tinggi
97.	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	63,41	59,82	94,34	Sangat Tinggi
98.	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	97,01	96,1	99,06	Sangat Tinggi
99.	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
	Kecamatan Sidorejo					
100.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,70	89,23	100,59	Sangat Tinggi
101.	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	93,54	68,57	73,31	Sedang
102.	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	65	94,35	145,15	Sangat Tinggi
103.	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
Kecamatan Tingkir						
104.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	92,15	91,64	99,46	Sangat Tinggi
105.	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	73	64,76	88,71	Tinggi
106.	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	68,18	70,5	117,30	Sangat Tinggi
107.	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
Kecamatan Argomulyo						
108.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86	90,44	105,12	Sangat Tinggi
109.	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	63,6	60,76	95,53	Sangat Tinggi
110.	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	90,6	72,75	59,23	Rendah
111.	Persentase PKK Aktif	%	100	99,70	80,30	Tinggi
Rata-rata capaian kinerja					158,13	

Kategori:	$N \leq 50$	=	Sangat Rendah
	$50 < N \leq 65$	=	Rendah
	$65 < N \leq 75$	=	Sedang
	$75 < N \leq 90$	=	Tinggi
	$N > 90$	=	Sangat Tinggi

Rata-rata tingkat capaian indikator kinerja tujuan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 158,13. Rata-rata ini masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Pencapaian ini didukung oleh beberapa hal :

1. Adanya peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan dasar.
2. Adanya kerja sama yang baik dengan stakeholder pariwisata.
3. Masyarakat yang cepat memberikan laporan terkait adanya bencana, sehingga bencana dapat diatasi.
4. Adanya pendataan secara berkala terkait dengan penduduk yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
5. Adanya kesadaran lembaga pelaku industri terkait pentingnya legalitas untuk keberlangsungan usaha.
6. Adanya program pelatihan berbasis kebutuhan industri, bimbingan karier, dan peningkatan akses informasi lowongan kerja.
7. Koordinasi yang efektif antarunit kerja dalam memahami dan menerjemahkan rencana tenaga kerja ke dalam kegiatan operasional.
8. Sudah terbentuk kelembagaan terkait dengan forum anak secara keseluruhan, mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat kota.
9. Telah dilakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana kepada masyarakat, khususnya melalui organisasi wanita seperti PKK, GOW, dan DWP.
10. Koordinasi efektif dengan Bulog dan instansi terkait lainnya dalam pengadaan, distribusi, dan penyaluran beras untuk mendukung stabilitas cadangan pangan.
11. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).
12. Adanya peningkatan produksi pangan sumber protein seperti ikan, daging, telur, dan kacang-kacangan.
13. Produksi pangan strategis meningkat dan stabil, kenaikan produksi beras, jagung, sayur, buah, serta sumber protein hewani dan nabati, sehingga dapat menjaga rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan masyarakat.
14. Adanya peningkatan kegiatan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup.
15. Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di Kota Salatiga.

16. Pendampingan dan pembinaan teknis dengan transfer teknologi budidaya dan manajemen pakan dari penyuluh perikanan untuk meningkatkan produktivitas perikanan.
17. Penerapan teknologi pembenihan yang baik (Good Hatchery Practices), pendederan benih yang benar, dan penerapan standar teknik pemijahan untuk meningkatkan hasil produksi benih.
18. Banyaknya potensi destinasi pariwisata, dukungan pemerintah, kerja sama yang baik dengan stakeholder, dan kepedulian masyarakat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, serta banyak wisatawan yang berkunjung ke objek wisata.
19. Penerapan manajemen pemeliharaan yang baik seperti pengaturan pakan, kebersihan kandang, dan jadwal pemerahan yang tepat untuk meningkatkan produksi dan kualitas susu dari sapi perah.
20. Penyediaan RPH Rumah Pemotongan Hewan yang telah bersertifikat halal dan memiliki NKV (Nomor Kontrol Veteriner).
21. Penyediaan vaksin untuk menekan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis.
22. Adanya swalayan dan fasilitas perdagangan lainnya yang berkontribusi dalam peningkatan PDRB sektor perdagangan.
23. Adanya akses permodalan yang lebih mudah, peningkatan kemampuan SDM, kemudahan perizinan, dan dukungan regulasi, mampu meningkatkan angka pertumbuhan industri kecil dan menengah.
24. Telah dilakukan sosialisasi dan penyampaian informasi yang jelas mengenai peluang, manfaat, dan fasilitas yang disediakan di lokasi transmigrasi.

Walaupun rata-rata tingkat capaian indikator kinerja sasaran masuk dalam kategori sangat tinggi, namun ada beberapa indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah, yaitu :

1. Prevalensi balita gizi buruk
2. Kelurahan Tangguh Bencana.
3. Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif
4. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.
5. Peningkatan produksi perikanan (benih).
6. Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura.

7. Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan.
8. Indeks PMPRB.

Hal ini disebabkan karena :

1. Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana baru dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2025.
2. Kondisi alam dan faktor cuaca yang tidak dapat diprediksi.
3. Ada indikator kinerja yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun dan memerlukan penetapan dari pemerintah pusat terkait penilaian capaian kinerjanya.
4. Masih adanya stereotip gender pada politisi perempuan.
5. Data yang digunakan untuk pendataan wirausaha muda terbatas pada wirausaha muda yang memiliki NIB.
6. Penurunan produksi benih perikanan disebabkan karena adanya peremajaan indukan (afkir), sementara induk baru belum optimal berproduksi.
7. Kurangnya keterampilan petani dalam melakukan budidaya vanili terutama dalam pemeliharaan tanaman.
8. Kemarau kering yang berlangsung selama 2 tahun terakhir menyebabkan tanaman kering.
9. Penyakit jamur pada tanaman yang menyebabkan busuk batang dan cepat menular ke tanaman lain.
10. Penetapan target awal lain-lain PAD yang sah terlalu tinggi (RSUD belum masuk DKK).
11. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terakhir dirilis tahun 2022.

3.2.3. REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM, FISIK, DAN PENYERAPAN ANGGARAN

Realisasi pencapaian target kinerja program, fisik dan penyerapan anggaran dalam mencapai kinerja per urusan dari setiap Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

3.2.3.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan

a. Dinas Pendidikan

Rata-rata capaian kinerja program untuk urusan Pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebesar 104,27% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan tahun 2025 sebesar Rp216.062.728.021,00. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 sebesar Rp205.908.144,00 atau sebesar 95,30%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,86%.

2. Urusan Kesehatan

a. Dinas Kesehatan

Rata-rata capaian kinerja program untuk urusan Kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan dan RSUD sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebesar 100,53% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan yang juga mencakup RSUD tahun 2025 sebesar Rp351.202.044.675,00. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebesar Rp308.044.098.828,00 atau sebesar 87,71%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 98,26%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rata-rata capaian kinerja program untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebesar 99,66% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 sebesar Rp92.770.590.022,00. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebesar Rp84.818.769.924,00 atau sebesar 91,43%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 98,30%.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rata-rata capaian kinerja program untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebesar 97,67% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025 sebesar Rp32.960.004.509,00. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebesar Rp30.094.413.636,00 atau sebesar 91,31%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 96,27%.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Rata-rata capaian kinerja program untuk urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebesar 104,29% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 sebesar Rp13.888.878.877,00. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebesar Rp12.111.226.208,00 atau sebesar 87,20%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 97,02%.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rata-rata capaian kinerja program untuk urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebesar 100,11% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 sebesar Rp4.460.701.853,00. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp4.092.046.115,00 atau sebesar 91,74%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 97,14%.

6. Urusan Sosial

a. Dinas Sosial

Rata-rata capaian kinerja program untuk urusan Sosial yang diampu oleh Dinas Sosial sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebesar 100,32% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Sosial tahun 2025 sebesar Rp8.818.915.495,00. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp8.112.987.044,00 atau sebesar 92,00%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,99%.

3.2.3.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. Urusan Tenaga Kerja

a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Rata-rata capaian kinerja program untuk urusan Tenaga Kerja yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebesar 96,16% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2025 adalah sebesar Rp10.786.349.709,00. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp9.477.610.980,00 atau sebesar 87,87%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 98,95%.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebesar 89,06% atau masuk kategori tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 sebesar Rp11.855.187.678,00. Realisasi keuangan

sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp10.848.380.252,00 atau sebesar 91,51%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,68%.

3. Urusan Pangan

a. Dinas Pangan dan Pertanian

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pangan yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebesar 201,40% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2025 adalah sebesar Rp14.722.599.266,00. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp12.850.910.337,00 atau sebesar 87,29%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 94,27%.

4. Urusan Pertanahan

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pertanahan yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebesar 262,96% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025 sebesar Rp32.960.004.509,00. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebesar Rp30.094.413.636,00 atau sebesar 91,31%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 96,27%.

5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Dinas Lingkungan Hidup

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebesar 99,39% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 sebesar Rp34.049.631.268,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp31.504.232.688,00 atau sebesar 92,52%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 97,66%.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 102,09% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 sebesar Rp8.120.973.609,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp7.016.340.986,00 atau sebesar 86,40%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,38%.

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 98,83% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 sebesar Rp11.855.187.678,00. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp10.848.380.252,00 atau sebesar 91,51%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,68%.

8. Urusan Perhubungan

a. Dinas Perhubungan

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Perhubungan yang diampu oleh Dinas Perhubungan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 101,30% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Perhubungan tahun 2025 sebesar Rp21.386.861.375,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp20.455.616.531,00 atau sebesar 95,65%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,96%.

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Dinas Komunikasi dan Informatika

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Komunikasi dan Informatika yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 77,98% atau masuk kategori tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 adalah sebesar Rp14.513.801.491,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp12.228.551.825,00 atau sebesar 84,25%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,58%.

10. Urusan Koperasi dan UKM

a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Koperasi dan UKM yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 111,24% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2025 sebesar Rp8.145.197.246,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp7.251.509.305,00 atau sebesar 89,03%. Sedangkan realisasi fisik 95,69%.

11. Urusan Penanaman Modal

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Penanaman Modal yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 111,02% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 sebesar Rp5.105.771.791,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp4.681.235.739,00 atau sebesar 91,69%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,73%.

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga yang diampu oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 79,54% atau masuk kategori tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2025 adalah sebesar Rp21.512.595.371,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp20.296.770.317,00 atau sebesar 94,35%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 95,15%.

13. Urusan Statistik

a. Dinas Komunikasi dan Informatika

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Statistik yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 100,00% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 adalah sebesar Rp14.513.801.491,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp12.228.551.825,00 atau sebesar 84,25%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,58%.

14. Urusan Persandian

a. Dinas Komunikasi dan Informatika

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Persandian yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 97,05% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 adalah sebesar Rp14.513.801.491,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp12.228.551.825,00 atau sebesar 84,25%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,58%.

15. Urusan Kebudayaan

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Kebudayaan yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 102,43% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025 adalah sebesar Rp8.509.950.237,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp7.660.464.973,00 atau sebesar 89,17%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 96,33%.

16. Urusan Perpustakaan

a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Perpustakaan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 71,75% atau masuk kategori sedang.

Alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 sebesar Rp9.818.933.473,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp8.874.683.431,00 atau sebesar 90,38%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,72%.

Capaian kinerja program urusan Perpustakaan masih masuk dalam kategori sedang. Hal ini disebabkan karena :

Tingginya konsumsi konten hiburan digital (media sosial, video pendek) menggeser minat membaca buku atau bahan bacaan bermutu.

Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan, penyimpanan, dan display koleksi naskah kuno.

Pemeliharaan sarana dan prasarana layanan sering kali tertunda karena terbatasnya anggaran pemeliharaan yang tersedia.

17. Urusan Kearsipan

a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Kearsipan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 486,94% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 sebesar Rp9.818.933.473,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp8.874.683.431,00 atau sebesar 90,38%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,72%.

3.2.3.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Dinas Pangan dan Pertanian

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Kelautan dan Perikanan yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 100,00% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2025 sebesar Rp14.722.599.266,00. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp12.850.910.337,00 atau sebesar 87,29%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 94,27%.

2. Urusan Pariwisata

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pariwisata yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan triwulan 4 adalah 100,00% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025 adalah sebesar Rp8.509.950.237,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp7.660.464.973,00 atau sebesar 89,17%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 96,33%.

3. Urusan Pertanian

a. Dinas Pangan dan Pertanian

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pertanian yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 94,10% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2025 sebesar Rp14.722.599.266,00. Realisasi keuangan sampai

dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp12.850.910.337,00 atau sebesar 87,29%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 94,27%.

4. Urusan Perdagangan

a. Dinas Perdagangan

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Perdagangan yang diampu oleh Dinas Perdagangan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 83,99% atau masuk kategori tinggi.

Alokasi anggaran untuk Dinas Perdagangan tahun 2025 sebesar Rp14.903.248.388,00. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp13.388.977.515,00 atau sebesar 89,84%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 91,94%.

5. Urusan Perindustrian

a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Perindustrian yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 63,61% atau masuk kategori rendah.

Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2025 sebesar Rp10.786.349.709,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp9.477.610.980,00 atau sebesar 87,87%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 98,95%.

Capaian kinerja program untuk urusan Perindustrian masih masuk dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan karena penjadwalan pelaksanaan kegiatan yang kurang tepat.

6. Urusan Transmigrasi

a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Transmigrasi yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 40,00% atau masuk kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2025 sebesar Rp10.786.349.709,00. Realisasi anggaran sampai

dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp9.477.610.980,00 atau sebesar 87,87%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 98,95%.

Capaian kinerja program untuk urusan Transmigrasi masih masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena :

Adanya ketergantungan dengan kebijakan pemerintah pusat/provinsi.

Kuota calon transmigran hanya disediakan untuk 2 KK dan baru ada 1 calon transmigran yang terdata.

3.2.3.4. URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sekretariat Daerah

a. Sekretariat Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Sekretariat Daerah yang diampu oleh Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 288,20% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Sekretariat Daerah tahun 2025 sebesar Rp40.023.649.244,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp35.704.221.341,00 atau sebesar 89,21%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 97,29%.

2. Sekretariat DPRD

a. Sekretariat DPRD

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Sekretariat DPRD yang diampu oleh Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 100,11% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Sekretariat DPRD tahun 2025 sebesar Rp50.186.775.263,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp45.994.582.499,00 atau sebesar 91,65%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,62%.

3.2.3.5. URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Unsur Penunjang Perencanaan

a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Perencanaan yang diampu oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 102,91% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2025 sebesar Rp10.108.613.326,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp8.433.941.133,00 atau sebesar 83,43%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 98,13%.

2. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Penelitian dan Pengembangan yang diampu oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 121,02% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2025 sebesar Rp10.108.613.326,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp8.433.941.133,00 atau sebesar 83,43%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 98,13%.

3. Unsur Penunjang Keuangan

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Keuangan yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 93,34% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp33.301.072.002,00. Realisasi anggaran sampai triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp23.799.703.010,00 atau sebesar 71,47%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 89,89%.

4. Unsur Penunjang Kepegawaian

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Kepegawaian yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 114,95% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 sebesar Rp10.949.840.699,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp9.829.160.257,00 atau sebesar 89,77%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,94%.

5. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pendidikan dan Pelatihan yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 366,21% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 sebesar Rp10.949.840.699,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp9.829.160.257,00 atau sebesar 89,77%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,94%.

3.2.3.6. URUSAN PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN

1. Inspektorat

a. Inspektorat Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Inspektorat yang diampu oleh Inspektorat Daerah sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 99,50% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Inspektorat tahun 2025 sebesar Rp9.301.044.148,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp7.836.405.408,00 atau sebesar 84,25%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 89,04%.

3.2.3.7. URUSAN KEWILAYAHAN

1. Kecamatan

a. Kecamatan Sidorejo

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diampu oleh Kecamatan Sidorejo sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 120,05% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Kecamatan Sidorejo tahun 2025 sebesar Rp17.276.229.018,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp16.349.359.169,00 atau sebesar 94,63%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,55%.

b. Kecamatan Argomulyo

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diampu oleh Kecamatan Argomulyo sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 162,83% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Kecamatan Argomulyo tahun 2025 sebesar Rp17.320.996.070,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp15.932.055.788,00 atau sebesar 91,98%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,60%.

c. Kecamatan Tingkir

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diampu oleh Kecamatan Tingkir sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 80,41% atau masuk kategori tinggi.

Alokasi anggaran untuk Kecamatan Tingkir tahun 2025 sebesar Rp19.279.620.926,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun adalah Rp18.259.637.200,00 atau sebesar 94,71%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,70%.

d. Kecamatan Sidomukti

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diampu oleh Kecamatan Sidomukti sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 86,53% atau masuk kategori tinggi.

Alokasi anggaran untuk Kecamatan Sidomukti tahun 2025 sebesar Rp13.280.940.810,00. Realisasi anggaran sampai dengan

triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp12.651.765.960,00 atau sebesar 95,26%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,55%.

3.2.3.8. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rata – rata capaian kinerja program yang urusan Pemerintahan Umum yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah 119,15% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 sebesar Rp10.144.646.928,00. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah Rp9.146.111.339,00 atau sebesar 90,16%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Berikut disajikan Realisasi Keuangan dan Fisik dari Anggaran APBD Perubahan tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Capaian Realisasi Anggaran dan Fisik Kegiatan OPD sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 Kota Salatiga

No	OPD	APBD 2025	Bobot (%)	Realisasi			
				Keuangan		Fisik	
				(Rp.)	(%)	Target (%)	Tertimbang (%)
1	Dinas Pendidikan	216.062.728.021	19,04	205.908.144.809	95,30	100	99,86
2	Dinas Kesehatan	351.202.044.675	30,95	308.044.098.828	87,71	100	98,26
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92.770.590.022	8,17	84.818.769.924	91,43	100	98,30
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	32.960.004.509	2,90	30.094.413.636	91,31	100	96,27
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13.888.878.877	1,22	12.111.226.208	87,20	100	91,02
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.460.701.853	0,39	4.092.046.115	91,74	100	97,14
7	Dinas Sosial	8.818.915.495	0,78	8.112.987.044	92,00	100	99,99
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.786.349.709	0,95	9.477.610.980	87,87	100	98,95
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan. Pelindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.855.187.678	1,04	10.848.380.252	91,51	100	99,68
10	Dinas Lingkungan Hidup	34.049.631.268	3,00	31.504.232.688	92,52	100	97,66
11	Dinas Pangan dan Pertanian	14.722.599.266	1,30	12.850.910.337	87,29	100	94,27
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.120.973.609	0,72	7.016.340.986	86,40	100	99,38
13	Dinas Perhubungan	21.386.861.375	1,88	20.455.616.531	95,65	100	99,96
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.513.801.491	1,28	12.228.551.825	84,25	100	99,58
15	Dinas Koperasi. Usaha Kecil. dan Menengah	8.145.197.246	0,72	7.251.509.305	89,03	100	95,69
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.105.771.791	0,45	4.681.235.739	91,69	100	99,73
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	21.512.595.371	1,90	20.296.770.317	94,35	100	95,15
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.590.950.237	0,76	7.660.464.973	89,17	100	96,33

No	OPD	APBD 2025	Bobot (%)	Realisasi			
				Keuangan		Fisik	
				(Rp.)	(%)	Target (%)	Tertimbang (%)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.818.933.473	0,87	8.874.683.431	90,38	100	99,72
20	Dinas Perdagangan	14.903.248.388	1,31	13.388.977.515	89,84	100	91,94
21	Sekretariat Daerah	40.023.649.244	3,53	35.704.221.341	89,21	100	97,29
22	Sekretariat DPRD	50.186.775.263	4,42	45.994.582.499	91,65	100	99,62
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.108.613.326	0,89	8.433.941.133	83,43	100	98,13
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	33.301.072.002	2,93	23.799.703.010	71,47	100	89,89
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.949.840.699	0,96	9.829.160.257	89,77	100	99,94
26	Inspektorat Daerah	9.301.044.148	0,82	7.836.405.408	84,25	100	89,04
27	Kecamatan Sidorejo	17.276.229.018	1,52	16.349.359.169	94,63	100	99,55
28	Kecamatan Argomulyo	19.279.620.926	1,53	15.932.055.788	91,98	100	99,60
29	Kecamatan Tingkir	17.320.996.070	1,70	18.259.637.200	94,71	100	99,70
30	Kecamatan Sidomukti	13.280.940.810	1,17	12.651.765.960	95,26	100	99,55
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.144.646.928	0,89	9.146.111.339	90,16	100	100
Jumlah		1.134.849392.788	100	1.023.653.914.547	90,20	100	97,92

Sumber : diolah Bappeda 2025

Hasil Evaluasi Rata – Rata Capaian Kinerja Program per Urusan Sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 Kota Salatiga, tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 5 Evaluasi Rata – Rata Capaian Kinerja per Urusan Sampai Dengan Triwulan 4 Tahun 2025 Kota Salatiga

URAIAN		CAPAIAN (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1.	PENDIDIKAN					104,27
2.	KESEHATAN					100,53
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					99,66
4.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PERMUKIMAN)					97,67
5.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATPOL PP)					104,29
6.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (BPBD)					100,11
7.	SOSIAL					100,32
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.	TENAGA KERJA					96,16
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK				89,06	
3.	PANGAN					201,40
4.	PERTANAHAN					262,96
5.	LINGKUNGAN HIDUP					99,39
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					102,09
7.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					98,83
8.	PERHUBUNGAN					101,30
9.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				77,98	
10.	KOPERASI DAN UKM					111,24
11.	PENANAMAN MODAL					111,02
12.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				79,54	
13.	STATISTIK					100,00
14.	PERSANDIAN					97,05
15.	KEBUDAYAAN					102,43
16.	PERPUSTAKAAN			71,75		
17.	KEARSIPAN					486,94

URAIAN		CAPAIAN (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PILIHAN						
1.	KELAUTAN DAN PERIKANAN					100,00
2.	PARIWISATA					100,00
3.	PERTANIAN					94,10
4.	PERDAGANGAN				83,99	
5.	PERINDUSTRIAN		63,61			
6.	TRANSMIGRASI	40,00				
URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
1.	SEKRETARIAT DAERAH					288,20
2.	SEKRETARIAT DPRD					100,11
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1.	PERENCANAAN					102,91
2.	KEUANGAN					93,34
3.	KEPEGAWAIAN					114,95
4.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					121,02
5.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					366,21
URUSAN PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN						
1.	PENGAWASAN					99,50
1.	KECAMATAN SIDOREJO					120,05
2.	KECAMATAN ARGOMULYO					162,83
3.	KECAMATAN TINGKIR					80,41
4.	KECAMATAN SIDOMUKTI					86,53
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
1.	KESBANGPOL					119,15
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA		124,02				

Sumber : diolah Bappeda 2025

- Keterangan :**
- Sangat Rendah : Capaian <50% target Tahun 2025
 - Rendah : Capaian 50%-65% target Tahun 2025
 - Sedang : Capaian 65%-75% target Tahun 2025
 - Tinggi : Capaian 75%-90% target Tahun 2025
 - Sangat Tinggi : Capaian ≥ 90% target Tahun 2025

Adapun hasil Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 Kota Salatiga, tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 6 Evaluasi Capaian Kinerja Program per Urusan Sampai Dengan Triwulan 4 Tahun 2025 Kota Salatiga

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH						Dinas Pendidikan
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
	APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A	%	100,00	117,02	117,02		
	APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B	%	100,00	135,55	135,55		
	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,01	0,00	100,01		
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,06	0,04	100,02		
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	88,44	85,11	96,23		
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	97,73	84,45	96,21		
	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,81	2,78	98,93		
	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,55	2,66	104,31		
	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,84	2,85	100,35		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,73	2,75	100,73		
	Persentase jumlah sekolah yang memenuhi kriteria minimum AKM jenjang SD/MI	%	97,85	97,85	100,00		
	Persentase jumlah sekolah yang memenuhi kriteria minimum jenjang SMP/MTs	%	91,67	100,00	109,09		
	APK PAUD	%	46,60	50,97	109,38		
	Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	%	78,07	78,07	100,00		
	Persentase kondisi kelas PAUD dalam kondisi baik	%	87,43	89,42	102,28		
	Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan Baik	%	95,45	94,74	99,26		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						
	Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	%	74,19	74,19	100,00		
	Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	%	63,89	63,89	100,00		
	Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	%	75	75,00	100,00		
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						
	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang TK/RA	%	36,84	44,78	121,55		
	Persentase Guru bersertigikat pendidik jenjang SD	%	49,31	60,06	121,80		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	%	58,65	66,85	113,98		
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1 jenjang PAUD	%	87,80	88,26	100,52		
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1 jenjang MI	%	97,15	95,72	98,53		
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1 jenjang SMP	%	99,10	99,33	100,23		
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						
	Persentase TK/RA yang terakreditasi	%	90,36	89,57	99,14		
	Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi	%	83,33	100,00	120,00		
	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan yang berizin	%	92,86	92,86	100,00		
	Persentase Sekolah yang memiliki izin operasional jenjang SD/MI	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase Sekolah yang memiliki izin operasional jenjang SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00		
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						
	Persentase sekolah yang mengembangkan model pembelajaran Bahasa Jawa jenjang SD/MI	%	20,43	20,43	100,00		
	Persentase sekolah yang mengembangkan model pembelajaran Bahasa Jawa jenjang SMP/MTs	%	42,86	42,86	100,00		
	Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata Pelajaran yang diberikan ke siswa	%	66,67	66,67	100,01		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100,00	100,00	100,00	●	
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit	%	88,57	88,70	103,14	●	
	Cost Recovery	%	100,00	28,94	28,94	▼	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	50,00	50,00	▼	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	10,00	14,49	144,90	●	
	Angka penemuan kasus baru TBC/Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	145,00	291,92	201,32	●	
	Angka penemuan Pneumonia Balita	%	57,00	95,83	168,12	●	
	Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	<1	0,24	26,67	▼	
	Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	39,10	13,04	33,35	▼	
	Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	78,00	76,00	97,44	●	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	88,00	76,36	86,77		
	Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan mendapat ASI eksklusif	%	80,00	82,07	102,59		
	Cakupan BIAS Campak Rubela	%	98,00	98,90	100,92		
	Cakupan BIAS DT/Td	%	98,00	99,00	101,02		
	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	%	99,00	100,00	101,01		
	Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan kepesertaan JKN	%	100,00	100,28	100,28		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (KF3)	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan Lansia	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan Orang Terduga TB	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100,00	100,00	100,00		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	99,84	99,00	99,16		
	Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	99,44	99,44	100,00		
	Cakupan UCI kelurahan	%	100,00	100	100,00		
	Deteksi Dini Hepatitis	%	82,00	92,09	112,30		
	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	100,00	96,77	96,77		
	Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100rb penduduk	<7	3,49	50,58		
	Kasus HIV/AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	100,00	92,05	92,05		
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	%	86,90	84,79	97,57		
	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	95,68	74,53	77,90		
	Pembentukan Posyandu Remaja	unit	30,00	0	0,00		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	5,00	7,00	140,00		
	Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,00	8	200,00		
	Persentase Ibu Hamil KEK	%	6,00	11,31	188,50		
	Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	7,43	5,77	77,66		
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100,00	100	100,00		
	Prevalensi Stunting pada Balita	%	6,51	6,4	98,31		
	Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100	100,00		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100	100,00		
	Persentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	87,00	107,73	123,83		
	Persentase ketersediaan obat esensial di Puskesmas dan KPM	%	85,00	116,00	136,47		
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	100,00	100	100,00		
	Persentase RS rujukan yang terakreditasi	%	100,00	100	100,00		
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	1,65	0,459	27,82		
	Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1x24 jam	%	100,00	100	100,00		
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	%	73,04	68,14	93,29		
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	%	59,00	57,77	97,92		
	Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat	%	88,00	87,88	99,86		
	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	84,00	100	119,05		
	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	99,67	86,36	86,65		
	Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	90,00	90,87	100,97		
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
	Cakupan desa siaga strata mandiri	%	100	100	100,00		
	Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	98,11	98,11	100,57		
	Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	99,35	99,35	102,00		
	Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100	100	100,00		
	Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	96,83	96,83	99,63		
	Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	94,92	94,92	100,61		
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						DPUPR
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86,00	88,75	103,20		
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100,00	100,00	100,00		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum	%	94,00	93,20	99,15		
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
	Persentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,68	92,01	96,16		
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						
	Persentase jaringan drainase kondisi baik	%	97,00	96,49	99,47		
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
	Rasio kepatuhan IMB	%	88,00	87,67	99,63		
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						
	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	100,00	100,00	100,00		
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						
	Persentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap	%	92,00	91,97	99,97		
	Persentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik	%	20,00	19,73	98,65		
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	94,00	93,81	99,80		
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	94,00	94,20	100,21		
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						Dinas PKP
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,00	95,41	96,01		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota	%	66,67	15,00	22,50		
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	%	75,00	0,00	0,00		
	Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan	%	75,00	100,00	133,33		
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	11,27	36,47	323,60		
	Terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP)	%	0,00	0,00	0,00		
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	7,18	4,45	61,98		
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan	%	55,00	56,29	102,35		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU	%	18,34	20,00	109,05		
	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU	%	8,00	10,23	127,88		
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						SATPOL PP
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP	%	88,00	89,25	101,42		
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Persentase penegakan Perda dan Per Ka Da	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00		
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						
	Persentase ketersediaan sarana prasarana Damkar yang memadai	%	75,00	80,00	106,67		
	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran	%	85,00	100,00	117,65		
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						BPBD
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPBD	%	87,00	88,15	101,32		
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase kecukupan sarana dan prasaana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik	%	38,30	38,00	99,22		
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						Dinas Sosial
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,00	90,49	100,54		
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
	Persentase terbentuknya Lembaga Puskesmas	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment	%	100,00	100,00	100,00		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Persentase PSKS yang dibina	%	98,87	100,00	101,14		
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
	Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00		
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
	Persentase penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lansia telantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	 	
	Persentase data fakir miskin yang divalidasi	%	97,70	97,69	99,99		
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
	Cakupan pengeloalaan Taman Makam Pahlawan	%	100,00	100,00	100,00		
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						Disperinaker
	1 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
	Persentase pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	%	100,00	205,00	205,00		
	Perentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	100,00	1,02	1,02		
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
	Persentase realisasi kegiatan Bursa Tenaga Kerja	%	100,00	103,33	103,33		
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	100,00	73,68	73,68		
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	93,66	91,71	97,92		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK						DP3APPKB
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,00	89,32	100,36		
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
	Persentase kelembagaan PUG aktif	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,24	6,00	64,94		
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase perempuan di legislatif	%	24,00	8,00	33,33		
3	PROGRAM PELINDUNGAN PEREMPUAN						
	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00		
	Rasio kekerasan terhadap perempuan	%	44,00	69,63	158,25		
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	25,00	25,00	100,00		
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
	Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem gender dan anak	%	100,00	100,00	100,00		
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
	Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak	%	6,80	1,55	22,79		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
7	PROGRAM PELINDUNGAN KHUSUS ANAK						
	Persentase anak korban kekerasan	%	0,06	0,06	100,00		
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						DISPANGTAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,89	89,13	100,27		
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN						
	Penyediaan infrastruktur pangan	%	92,69	93,02	100,36		
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
	Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	%	94,11	90,95	96,64		
	Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER)	Skor PoU	5,02	4,67	93,03		
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						
	Persentase penanganan rumah tangga rawan pangan	%	10,20	74,37	729,12		
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						
	Persentase pangan segar aman	%	98,00	87,18	88,96		
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						DINAS PKP

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						
	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	100,00	100,00	100,00		
2	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH						
	Persentase bidang tanah yang terdata dan terpetakan	%	0,00	0,00	0,00		
	Persentase data rupa bumi yang tersedia	%	75,00	100,00	133,33		
	Persentase penyertifikatan tanah hasil pengadaan, PSU, dan TPU	%	100,00	100,00	100,00		
3	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						
	Cakupan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	9,00	100,00	1.111,11		
	Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	75,00	100,00	133,33		
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						DINAS LH
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84,00	84,17	100,20		
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
	IKPLHD	Dokumen	1	1	100,00		
	KLHS	Dokumen	0	0	0,00		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
	Pemantauan Status Mutu Air	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase Konservasi Lahan	%	15,00	15,00	100,00		
	Persentase Konservasi Sumber Mata Air	%	30,00	30,00	100,00		
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						
	Persentase ruang terbuka hijau	%	17,40	17,40	100,00		
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)						
	Persentase penyimpanan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan	%	30,00	30,00	100,00		
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						
	Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	100,00	82,14	82,14		
	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan	%	32,00	69,42	216,94		
	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	 	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Persentase tersusunnya dokumen IGRK	%	100,00	100,00	100,00		
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
	Persentase penghargaan lingkungan tingkat kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase penerima penghargaan tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat provinsi	%	100,00	100,00	100,00		
	Peningkatan kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup	%	40,00	40,00	100,00		
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
	Persentase pengurangan sampah	%	30,00	22,81	76,03		
	Persentase penanganan sampah	%	71,00	75,63	106,52		
	Persentase pengangkutan sampah	%	71,00	75,63	106,52		
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						DINAS DUKCAPIL
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,85	91,44	100,51		
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
	Cakupan penduduk perekaman KTP-el	%	98,00	97,69	101,55		
	Persentase penerbitan KIA 0-5 th	%	86,00	87,46	109,60		
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						
	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th	%	99,76	99,79	100,90		
	Persentase Akta Perkawinan non muslim	%	100,00	100,00	100,00		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
	Ketersediaan database kependudukan	%	100,00	100,00	100,00		
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						DP3APPKB
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
	Cakupan pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	%	100,00	100,00	100,00		
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR)	%	0,63	0,63	100,00		
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	0,07	0,07	100,00		
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	tahun	23,00	23,00	100,00		
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA						
	Rasio akseptor KB baru	%	14,31	14,31	100,00		
	Cakupan peserta KB aktif	%	67,70	67,70	100,00		
	Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	rasio	1:2,3	1:2,5	108,00		
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 thn	%	67,70	67,70	100,00		
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	8,51	8,51	100,00		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	26,65	27,57	103,45		
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	%	100,00	100,00	100,00		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	rasio	1:2	1:1,9	94,74		
	Cakupan Balita/Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	100,00	99,66	99,66		
	Cakupan perkawinan usia di bawah 21 tahun	%	0,39	0,39	100,00		
	Cakupan kader BKB yang terlatih	%	75,00	53,69	71,59		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	96,00	97,47	101,53		
	Persentase Baduta Stunting	%	5,75	5,75	100,00		
H	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						DINAS PERHUBUNGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,82	95,70	108,97		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
	Persentase rambu-rambu terpasang	%	89,00	89,00	100,00		
	Persentase layanan angkutan darat	%	29,00	27,53	94,93		
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85,00	81,08	95,39		
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00		
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,00	16,52	16,52		
J	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						DINAS KOPERASI UKM
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,43	86,66	101,44		
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						
	Persentasi koperasi yang berkualitas	%	73,96	71,88	97,19		
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
4	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	%	53,12	53,53	100,77		
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						
5	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	%	83,91	85,07	101,38		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI						
6	Persentase akses pasar anggota koperasi	%	75,00	87,50	116,67		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
7	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	%	24,90	25,93	104,14		
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						
	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	48,32	48,80	157,12		
K	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						DPMPTSP
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,50	92,18	103,57		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	Rupiah (Milyar)	635,00	1.123,13	191,39		
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
4	Persentase kenaikan jumlah minat investasi berskala nasional (PMA dan PMDN)	%	10,00	10,53	105,26		
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
5	Persentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	%	98,30	99,94	101,66		
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
6	Persentase kenaikan jumlah LKPM yang masuk	%	54,16	8,15	15,04		
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						
L	Persentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola	%	10,00	14,92	149,19		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						DISPORA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,00	82,78	103,48		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
	Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	5,44	3,00	55,15		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
	Persentase atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	%	27,00	18,00	66,67		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						
	Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas kepramukaan	%	70,00	65,00	92,86		
M	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						DISKOMINFO
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00		
N	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						DISKOMINFO
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
	Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	%	73,00	70,85	97,05		
O	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						DISBUDPAR
1	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86,85	88,70	102,13		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	57,97	76,81	132,50		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						
	Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola	%	100,00	100,00	100,00		
4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						
	Persentase kajian sejarah	%	75,00	50,00	66,67		
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						
	Persentase penetapan cagar budaya	%	38,57	46,38	120,25		
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						
	Persentase penambahan jumlah koleksi museum	%	38,18	35,53	93,06		
P	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						DINPERSIP
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,21	85,38	102,61		
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
	Nilai tingkat kegemaran membaca	%	85,83	75,23	87,65		
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Persentasi koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan	%	100,00	25,00	25,00		
Q	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						DINPERSIP
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	100,00	100,00	100,00		
2	PROGRAM PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						
	Persentase jumlah arsip yang diselamatkan	%	100,00	45,67	45,67		
3	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP						
	Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip	%	100,00	1.315,16	1.315,16		
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						DISPANGTAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	%	35,00	35,00	100,00		
2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						
	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	100,00	100,00	100,00		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Persentase kelompok-kelompok pengolah dan pemaaar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	%	35,00	35,00	100,00		
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						DISBUDPAR
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
	Persentase obyek wisata yang ditingkatkan	%	100,00	100,00	100,00		
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
	Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata	%	100,00	100,00	100,00		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PELINDUNGAN HAK KEKAYAAAN INTELEKTUAL						
	Persentase pengelolaan ekonomi kreatif	%	100,00	100,00	100,00		
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
	Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	%	100,00	100,00	100,00		
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	%	75,00	75,00	100,00		
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
	Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	%	75,00	75,00	100,00		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHAAN MASYARAKAT VETERINER						
	Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis	%	0,00	0,00	100,00		
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						
	Persentase kejadian bencana pertanian	%	0,00	0,00	100,00		
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani						
	- Pemula	%	58,56	60,00	102,46		
	- Lanjut	%	58,56	74,00	126,37		
	- Madya	%	15,31	22,00	124,01		
	- Utama	%	2,60	0,00	0,00		
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						DINAS PERDAGANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84,15	85,96	102,15		
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
	Persentase jumlah perizinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan	%	20,00	20,00	100,00		
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PEDAGANGAN						
	Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar	%	95,00	95,00	100,00		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina	%	85,00	85,00	100,00		
	Persentase kelompok PKL yang dibina	%	51,00	51,00	100,00		
	Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL	%	34,00	34,00	100,00		
	Persentase PKL yang menempati Lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL	%	36,00	36,00	100,00		
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						
	Persentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk	%	100,00	100,00	100,00		
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	%	26,00	26,00	100,00		
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						
	Persentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga	%	90,00	0,00	0,00		
6	PROGRAM STANDARISASI DAN PELINDUNGAN KONSUMEN						
	Persentase alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah	%	90,00	19,54	21,71		
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						DISPERINAKER
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,88	88,31	99,36		
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
2	Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang	%	0,38	0,31	82,31		
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA						
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan denagn jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	9,54	9,54		
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	1,41	0,00	0,00		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						
	Persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	%	13,30	16,87	126,86		
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						DISPERINAKER
1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						
	Persentase pelaksanaan proses transmigrasi	%	100,00	40,00	40,00		
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
A	SEKRETARIAT DAERAH						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas	%	100,00	97,89	97,89		Bagian Prokompin
	Persentase kegiatan Administrasi Umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi	%	100,00	100	100,00		Bagian Umum
	Cakupan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100,00	100	100,00		Bagian Pembangunan
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
	Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	%	100,00	99,6	99,60		Bagian Pemerintahan
	Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan	%	100,00	89,47	89,47		
	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	100	100	100,00		
	Skor LPPD	Nilai	3,10	100	3.225,81		
	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 Maret)	%	100,00	100	100,00		
	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang hukum	%	100,00	100	100,00		Bagian Hukum
	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	%	100,00	100	100,00		Bagian Kesra
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
	Cakupan koordinasi program perekonomian dan pembangunan	%	100,00	74,58	74,58		Bagian Perekonomian
	Cakupan koordinasi OPD pengampu DBHCHT	%	100,00	90,47	90,47		
	Cakupan koordinasi dan pembinaan BMUD/BLUD	%	100,00	23,75	23,75		
	Cakupan koordinasi bidang lingkungan hidup dan SDA	%	100,00	90,57	90,57		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Cakupan koordinasi POK	%	100,00	100	100,00		Bagian Pembangunan
	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	84,00	100	119,05		Bagian PBJ
B	SEKRETARIAT DPRD						
1	PROGRAM ADMINISITRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA						
	Tingkat kepuasan DPRD dalam fasilitasi pelayanan kesekretariatan	%	94,85	100,00	105,43		
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI						
	Cakupan fasilitasi fungsi Legislasi	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran	%	100,00	100,00	100,00		
	Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan	%	100,00	95,00	95,00		
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
A	PERENCANAAN						BAPPEDA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,00	82,60	99,52		
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
	Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah	%	98,00	98,24	100,24		
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Penjabaran konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	%	98,00	100,00	102,04		
	Penjabaran konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	%	90,00	98,86	109,84		
B	KEUANGAN						BPKPD
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82,73	82,73	100,00		
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
	Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	20,20	20,00	99,01		
	Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%	86,36	86,25	99,87		
	Budget execution : deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4,50	6,01	133,56		
	Cash management (Persentase anggaran)	%	15,07	11,99	79,56		
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100,00	91,69	91,69		
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00		
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
	Asset management	Laporan	4,00	4,00	100,00		
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Revenue mobilization : deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	22,48	8,18	36,39		
C	KEPEGAWAIAN						BKPSDM
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,50	83,60	100,12		
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
	Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan	%	1,47	3,66	248,98		
	Persentase PNS yang mengikuti assessment	%	8,00	3,06	38,25		
	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	75,00	76,33	101,77		
	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	25,00	25,21	100,84		
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00	99,72	99,72		
D	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						BKPSDM
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	%	4,38	48,19	559,70		
	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	%	6,24	58,00	172,72		
E	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah	%	37,50	53,61	121,02		BAPPEDA
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						INSPEKTORAT DAERAH
A	INSPEKTORAT DAERAH						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,30	80,61	99,15		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	%	90,00	90,91	101,01		
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	94,00	95,74	101,85		
	Persentase jumlah OPD meningkat Nilai Evaluasi SAKIP	%	60,00	60,00	100,00		
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
	Nilai MCP Korsupgah KPK	%	94,58	90,30	95,47		
VII	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
A	KECAMATAN SIDOREJO						KECAMATAN SIDOREJO
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	Persentase peningkatan skor IKM	%	0,4	0,60	150,00		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	%	65,00	100,00	153,85		
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
	Persentase upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	%	100,00	100,00	100,00		
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kecamatan Sidorejo	%	69,00	80,37	116,47		
B	KECAMATAN ARGOMULYO						KECAMATAN ARGOMULYO
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH						
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
3	Persentase peningkatan skor IKM	%	1,40	6,60	471,43		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	%	90,60	53,66	59,23		
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
5	Persentase upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	%	100,00	100,00	100,00		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kecamatan Argomulyo	%	63,55	93,00	146,34		
C	KECAMATAN TINGKIR						KECAMATAN TINGKIR
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA						
2	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	Persentase peningkatan skor IKM	%	2,05	0,10	4,88		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
4	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100,00	100,00	100,00		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
	Persentase upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	%	100,00	100,00	100,00		
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kecamatan Tingkir	%	83,48	64,76	77,58		
D	KECAMATAN SIDOMUKTI						KECAMATAN SIDOMUKTI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH						
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	Persentase peningkatan skor IKM	%	1,22	0,26	21,31		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100,00	100,00	100,00		
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Persentase upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100,00	100,00	100,00		
	Persentase terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	%	100,00	100,00	100,00		
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kecamatan Sidomukti	%	89,73	87,83	97,88		
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						KESBANGPOL
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	85,49	87,16	101,95		
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						
	Persentase pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila	%	84,38	95,56	113,25		
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
	Persentase pendidikan politik yang dilaksanakan	%	100,00	98,19	98,19		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWAASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	Status Capaian	OPD
	Sasaran Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						
	Persentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	%	62,16	99,50	160,07		
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						
	Prosentase penurunan penyalahgunaan narkoba	%	8,00	0,40	5,00		
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	78,98	93,33	118,17		
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						
	Persentase penurunan kejadian atau konflik sosial	%	35,00	83,10	237,43		

Keterangan :

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Target tahun 2025)

-  : 91% ≤ 100% Sangat Tinggi
-  : 76% ≤ 90% Tinggi
-  : 66% ≤ 75% Sedang

-  : 51% ≤ 65% Rendah
-  : ≤ 50% Sangat Rendah

3.3. KESELARASAN DAN KONSISTENSI

3.3.1. PERBANDINGAN RENCANA PROGRAM YANG TERCANTUM DALAM RPD TAHUN 2023-2026 DENGAN RKPD TAHUN 2025

Jumlah program yang ada dalam RPD Tahun 2023-2026 sama dengan jumlah program dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 yaitu 172. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persentase program dalam RPD 2023-2026 yang sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar 100%.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 7 Perbandingan Jumlah Program RPD Tahun 2023-2026 dengan Program Perubahan RKPD Tahun 2025

No	OPD	RPD			RKPD		
		Non Rutin	Rutin	Jml	Non Rutin	Rutin	Jml
1	Dinas Pendidikan	5	1	6	5	1	6
2	Dinas Kesehatan	4	1	5	4	1	5
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	1	10	9	1	10
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	7	6	1	7
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	1	3	2	1	3
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	2	1	1	2
7	Dinas Sosial	5	1	6	5	1	6
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7	1	8	7	1	8
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	1	10	9	1	10
10	Dinas Lingkungan Hidup	7	1	8	7	1	8
11	Dinas Pangan dan Pertanian	11	1	12	11	1	12
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	1	4	3	1	4
13	Dinas Perhubungan	1	1	2	1	1	2
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	1	5	4	1	5
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	1	7	6	1	7
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	5	1	6	5	1	6
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3	1	4	3	1	4
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9	1	10	9	1	10
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	5	1	6	5	1	6
20	Dinas Perdagangan	5	1	6	5	1	6

No	OPD	RPD			RKPD		
		Non Rutin	Rutin	Jml	Non Rutin	Rutin	Jml
21	Sekretariat Daerah	2	1	3	2	1	3
22	Sekretariat DPRD	1	1	2	1	1	2
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	1	4	3	1	4
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3	1	4	3	1	4
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	1	3	2	1	3
26	Inspektorat Daerah	2	1	3	2	1	3
27	Kecamatan Sidorejo	4	1	5	4	1	5
28	Kecamatan Tingkir	4	1	5	4	1	5
29	Kecamatan Argomulyo	4	1	5	4	1	5
30	Kecamatan Sidomukti	4	1	5	4	1	5
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	6	5	1	6
	Jumlah	141	31	172	141	31	172

Sumber : diolah Bappeda 2025

3.3.2. PERBANDINGAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KEUANGAN YANG TERCANTUM DALAM RKPD TAHUN 2025 DENGAN APBD PENETAPAN TAHUN 2025

Jumlah program yang ada dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 sama dengan jumlah program dalam APBD tahun 2025 berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 28 April 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 50 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebanyak 172 program, akan tetapi ada perbedaan dalam nama program. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persentase program dalam Perubahan RKPD tahun 2025 yang sesuai dengan APBD tahun 2025 sebesar 100%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

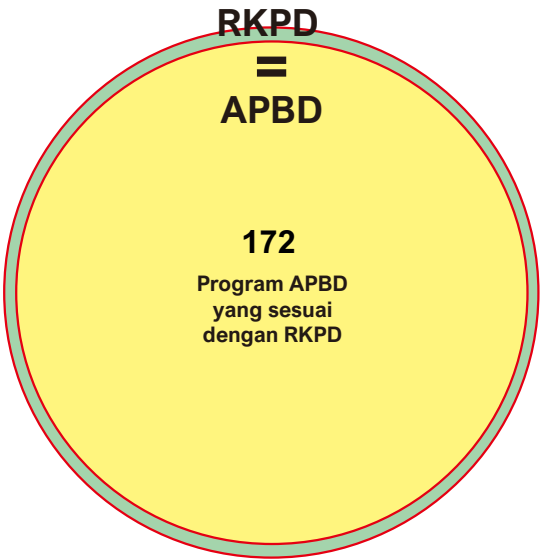
Tabel 3. 8 Perbandingan Jumlah Program pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Program pada APBDP Tahun 2025

NO	OPD	RKPD	APBD	RKPD > APBD	RKPD < APBD	RKPD = APBD
1	Dinas Pendidikan	6	6			6
2	Dinas Kesehatan	5	5			5
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	10			10
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7	7			7
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3			3
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2			2
7	Dinas Sosial	6	6			6
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8	8			8
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	10			10
10	Dinas Lingkungan Hidup	8	8			8
11	Dinas Pangan dan Pertanian	12	12			12
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4			4
13	Dinas Perhubungan	2	2			2
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5			5
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7	7			7
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	6	6			6
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	4			4
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10	10			10
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	6	6			6
20	Dinas Perdagangan	6	6			6
21	Sekretariat Daerah	3	3			3
22	Sekretariat DPRD	2	2			2
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	4			4
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4	4			4

NO	OPD	RKPD	APBD	RKPD > APBD	RKPD < APBD	RKPD = APBD
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3			3
26	Inspektorat Daerah	3	3			3
27	Kecamatan Sidorejo	5	5			5
28	Kecamatan Tingkir	5	5			5
29	Kecamatan Argomulyo	5	5			5
30	Kecamatan Sidomukti	5	5			5
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6			6
	JUMLAH	172	172			172

Sumber : diolah Bappeda 2025

Diagram 3. 1 Perbandingan Jumlah Program Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 Dengan Jumlah Program Dalam APBD Tahun 2025



Tabel 3. 9 Perbandingan Jumlah Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Kegiatan Pada APBD Tahun 2025

NO	OPD	RKPD	APBD	RKPD > APBD	RKPD < APBD	RKPD = APBD
1	Dinas Pendidikan	17	17			17
2	Dinas Kesehatan	20	20			20
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20	20			20
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	18	18			18
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13	13			13

NO	OPD	RKPD	APBD	RKPD > APBD	RKPD < APBD	RKPD = APBD
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	12			12
7	Dinas Sosial	14	14			14
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	17	17			17
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28	28			28
10	Dinas Lingkungan Hidup	16	16			16
11	Dinas Pangan dan Pertanian	30	30			30
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16	16			16
13	Dinas Perhubungan	15	15			15
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	11			11
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13	13			13
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	14	14			14
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	15	15			15
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19	19			19
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	20	20			20
20	Dinas Perdagangan	17	17			17
21	Sekretariat Daerah	20	20			20
22	Sekretariat DPRD	17	17			17
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15	15			15
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	15	15			15
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13	13			13
26	Inspektorat Daerah	12	12			12
27	Kecamatan Sidorejo	14	14			14
28	Kecamatan Tingkir	14	14			14
29	Kecamatan Argomulyo	13	13			13
30	Kecamatan Sidomukti	14	14			14
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	12			12
	JUMLAH	504	504	0	0	504

Sumber : diolah Bappeda 2025

Perubahan RKPD tahun 2025 memiliki 504 kegiatan, sedangkan APBD Tahun 2025 memiliki 504 kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase jumlah kegiatan dalam Perubahan RKPD tahun 2025 yang sesuai dengan APBD Tahun 2025 sebesar 100%.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Diagram 3. 2 Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Kegiatan dalam APBD Tahun 2025



Sumber : diolah Bappeda 2025

Tabel 3. 10 Perbandingan Sub kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Sub kegiatan APBD Tahun 2025

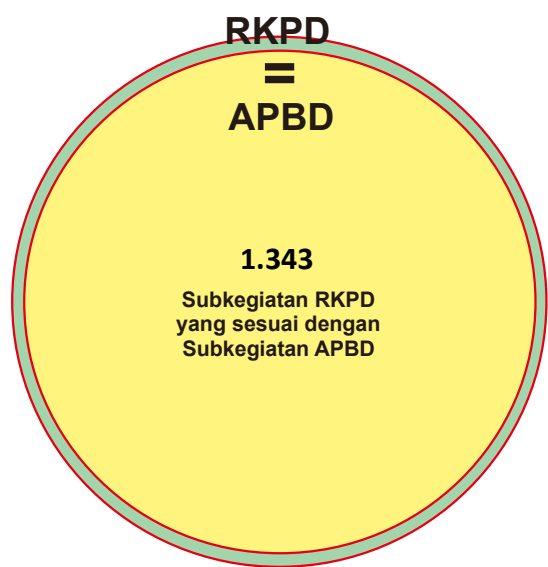
NO	OPD	RKPD	APBD	RKPD > APBD	RKPD < APBD	RKPD = APBD
1	Dinas Pendidikan	72	72			72
2	Dinas Kesehatan	69	69			69
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58	58			58
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	37	37			37
5	Satuan Polisi Pamong Praja	38	38			38
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38	38			38
7	Dinas Sosial	37	37			37
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	34	34			34
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	64	64			64
10	Dinas Lingkungan Hidup	35	35			35

NO	OPD	RKPD	APBD	RKPD > APBD	RKPD < APBD	RKPD = APBD
11	Dinas Pangan dan Pertanian	66	66			66
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35	35			35
13	Dinas Perhubungan	38	38			38
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	35	35			35
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	29	29			29
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	30	30			30
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	48	48			48
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40	40			40
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	52	52			52
20	Dinas Perdagangan	37	37			37
21	Sekretariat Daerah	62	62			62
22	Sekretariat DPRD	60	60			60
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	40	40			40
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	65	65			65
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35	35			35
26	Inspektorat Daerah	37	37			37
27	Kecamatan Sidorejo	30	30			30
28	Kecamatan Tingkir	32	32			32
29	Kecamatan Argomulyo	28	28			28
30	Kecamatan Sidomukti	29	29			29
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33	33			12
JUMLAH		1343	1.343	0	0	1343

Perubahan RKPD tahun 2025 memiliki 1.343 subkegiatan, sedangkan APBD tahun 2025 memiliki 1.343 subkegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase subkegiatan dalam Perubahan RKPD tahun 2025 yang sesuai dengan APBD Tahun 2025 sebesar 100%.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Diagram 3. 3 Perbandingan Jumlah Sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Sub kegiatan dalam APBD Tahun 2025



Sumber : diolah Bappeda 2025

Tabel 3. 11 Perbandingan Jumlah Anggaran Dalam RKPD Tahun 2025 dengan APBD Penetapan Tahun 2025

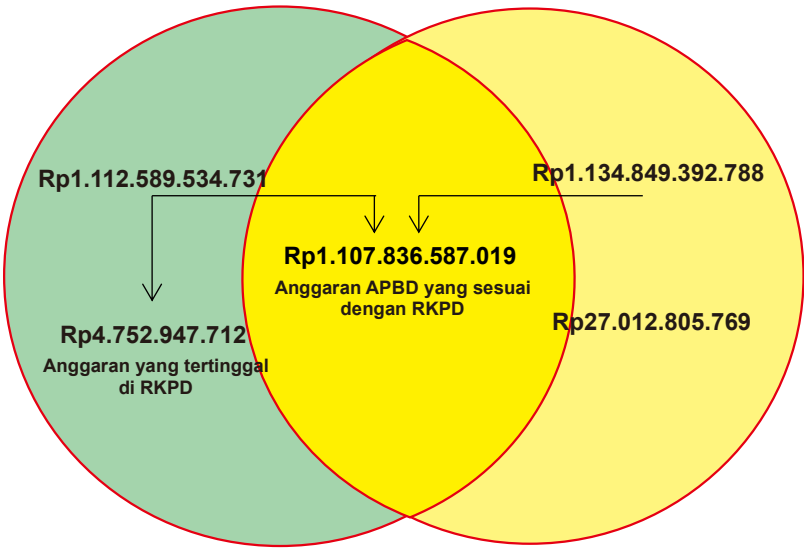
NO	OPD	RKPD Tahun 2025 (Rp)	APBD Tahun 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Dinas Pendidikan	214.677.074.021	216.062.728.021	-1.385.654.000
2	Dinas Kesehatan	347.586.641.893	351.202.044.675	-3.615.402.782
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.405.477.122	92.770.590.022	-12.365.112.900
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	33.411.004.509	32.960.004.509	451.000.000
5	Satuan Polisi Pamong Praja	14.888.878.877	13.888.878.877	1.000.000.000
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.460.701.853	4.460.701.853	0
7	Dinas Sosial	8.918.915.495	8.818.915.495	100.000.000
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.786.349.709	10.786.349.709	0
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.649.291.678	11.855.187.678	-205.896.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	33.543.555.194	34.049.631.268	-506.076.074
11	Dinas Pangan dan Pertanian	14.722.599.266	14.722.599.266	0
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.120.973.609	8.120.973.609	0
13	Dinas Perhubungan	21.376.861.375	21.386.861.375	-10.000.000
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.613.801.491	14.513.801.491	100.000.000

NO	OPD	RKPD Tahun 2025 (Rp)	APBD Tahun 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.915.197.246	8.145.197.246	-230.000.000
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	4.972.689.481	5.105.771.791	-133.082.310
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	21.212.595.371	21.512.595.371	-300.000.000
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.065.950.237	8.590.950.237	475.000.000
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	9.818.933.473	9.818.933.473	0
20	Dinas Perdagangan	14.656.765.385	14.903.248.388	-246.483.003
21	Sekretariat Daerah	39.992.584.544	40.023.649.244	-31.064.700
22	Sekretariat DPRD	42.202.741.263	50.186.775.263	-7.984.034.000
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.308.613.326	10.108.613.326	200.000.000
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	34.257.519.714	33.301.072.002	956.447.712
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.049.840.699	10.949.840.699	100.000.000
26	Inspektorat Daerah	9.501.044.148	9.301.044.148	200.000.000
27	Kecamatan Sidorejo	17.776.229.018	17.276.229.018	500.000.000
28	Kecamatan Tingkir	19.579.620.926	19.279.620.926	300.000.000
29	Kecamatan Argomulyo	17.391.496.070	17.320.996.070	70.500.000
30	Kecamatan Sidomukti	13.480.940.810	13.280.940.810	200.000.000
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.244.646.928	10.144.646.928	100.000.000
JUMLAH		1.112.589.534.731	1.134.849.392.788	-22.259.858.057

Jumlah anggaran yang terdapat dalam Perubahan RKPD tahun 2025 sebesar Rp1.112.589.534.731,00. Sedangkan jumlah anggaran dalam APBD tahun 2025 sebesar Rp1.134.849.392.788,00. Adapun jumlah anggaran dalam Perubahan RKPD tahun 2025 yang masuk dalam APBD Tahun 2025 sebesar Rp1.107.836.587.019,00. Ada anggaran yang tertinggal dalam Perubahan RKPD tahun 2025 sebesar Rp4.752.947.712,00 dan ada anggaran baru dalam APBD tahun 2025 sebesar Rp27.012.805.769,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase anggaran dalam Perubahan RKPD tahun 2025 yang masuk dalam APBD tahun 2025 sebesar 99,57%.

Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Diagram 3. 4 Perbandingan Jumlah Anggaran dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Anggaran dalam APBDP Tahun 2025



Sumber : diolah Bappeda 2025

BAB IV ANALISIS DAN PERMASALAHAN

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah pada RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan 4 yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, dan perlu untuk segera ditindaklanjuti agar target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD dapat tercapai pada akhir periode. Kendala dan permasalahan dalam pencapaian target kinerja sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 dibagi dalam permasalahan internal dan eksternal.

Secara umum, kendala dan permasalahan internal yang mempengaruhi pencapaian Kinerja Indikator Pembangunan Daerah sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah pencapaian realisasi keuangan dan fisik kegiatan yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh karena :

- Proses pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan perencanaan atau Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan. Termasuk pemenuhan personil organisasi kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa, penentuan sasaran/lolasi kegiatan serta pembiayaan;
- Masih banyaknya Perangkat Daerah yang menjadwalkan pelaksanaan kegiatan di triwulan 1, 2, 3, dan 4. Sehingga hasil penilaian baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun dan memerlukan penetapan resmi dari pemerintah pusat.

Sedangkan secara umum, kendala dan permasalahan eksternal yang mempengaruhi pencapaian Kinerja Indikator Pembangunan Daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan 4 adalah :

- Munculnya peraturan atau kebijakan yang baru dari pusat maupun provinsi yang harus ditindaklanjuti oleh daerah, yang berakibat adanya penyesuaian pada APBD 2025;
- Keterlambatan dalam penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi, sehingga dalam pelaksanaan belum bisa sesuai waktu yang telah direncanakan.

Adapun secara khusus, kendala dan permasalahan untuk setiap urusan dengan nilai capaian indikator programnya masih belum memenuhi target adalah sebagai berikut :

1. Walaupun rata-rata capaian kinerja urusan Pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan sudah masuk kategori sangat tinggi, tetapi indikator kinerja urusan Pendidikan masih belum optimal. Kinerja urusan Pendidikan yang belum sesuai

- dengan target, hal ini disebabkan karena pengampu kegiatan tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Kinerja urusan Kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan sudah masuk dalam kategori sangat tinggi, namun masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena :
 - a. Beberapa kegiatan yang bersumber dari dana DAK Non Fisik masih menunggu aturan terkait Perjadin ASN;
 - b. Untuk kegiatan pengawasan obat dan makanan yang akan disalurkan ke sarana distribusi, kadang terkendala pengurusan izin yang lama;
 - c. Tidak adanya tenaga kesehatan yang mengajukan pelatihan, karena sudah mengikuti pelatihan online;
 - d. Kesadaran Orang Dengan HIV (ODHIV) untuk berobat masih kurang.
 3. Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ada yang belum sesuai dengan target, hal ini disebabkan karena :
 - a. Terkendalanya proses koordinasi lintas perangkat daerah.
 - b. Kondisi cuaca yang sulit diprediksi, yang menghambat jadwal penyelesaian proyek.
 - c. Pendataan kondisi jembatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang menghasilkan data riil kondisi jembatan, masih berpengaruh dalam upaya peningkatan kinerja kondisi jembatan dalam kondisi bagus yang belum optimal.
 - d. Partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap infrastruktur masih rendah.
 - e. Keterbatasan anggaran dan SDM.
 - f. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB/IBG.
 - g. Belum tersedia revisi SK Jalan sehingga belum semua jalan dapat ditangani.
 4. Kinerja urusan Pertanahan yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ada yang belum sesuai dengan target. Hal ini disebabkan karena ada indikator program yang sudah tidak dianggarkan dalam kegiatan pendataan tanah. Indikator program ini berkaitan dengan program Trisula yang selesai dikerjakan pada tahun 2024.
 5. Walaupun capaian kinerja urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah masuk dalam kategori sangat tinggi, namun masih ada beberapa kendala, yaitu :
 - a. Masih tingginya pelanggaran terhadap produk hukum daerah.
 - b. Penyelenggaraan trantibum dan linmas yang belum optimal.
 - c. Koordinasi dengan perangkat daerah lain membutuhkan waktu yang lama.
 - d. Sering kekurangan anggota tim karena jadwal kegiatan yang bersamaan.

- e. Usia kendaraan khusus damkar yang sudah terlalu lama, sehingga kurang mendukung kegiatan.
 - f. Masyarakat yang kurang cepat melapor bila terjadi kebakaran.
 - g. Arus lalu lintas yang padat, terutama pada jam berangkat dan pulang sekolah/kerja, yang dapat menghambat kecepatan penanganan kejadian kebakaran.
6. Pencapaian kinerja urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah masuk dalam kategori sangat tinggi. Namun masih ada beberapa kendala, yaitu :
- a. Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya.
 - b. Kondisi cuaca yang sulit diprediksi.
 - c. Ada beberapa pengadaan yang spesifikasinya belum sesuai dengan barang yang ada di pasaran.
7. Pencapaian kinerja urusan Perindustrian yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja masuk dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan karena kurang tepat dalam melakukan penjadwalan pelaksanaan kegiatan.
8. Pencapaian kinerja urusan Transmigrasi yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena :
- a. Ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah pusat/provinsi.
 - b. Kuota untuk calon transmigrasi yang hanya untuk 2 KK.
 - c. Lokasi transmigrasi yang kurang diminati oleh calon transmigran (untuk tahun 2025, lokasinya adalah Halmahera).
9. Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana belum mencapai target seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena :
- a. Keterbatasan personil di lapangan dan sarana prasana yang kurang maksimal.
 - b. Adanya masyarakat yang masih malu untuk melaporkan adanya kejadian tindak kekerasan, sehingga banyak kasus kekerasan anak dan perempuan tidak dapat diatasi.
10. Kinerja urusan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup belum sesuai target, hal ini disebabkan karena :
- a. Pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan waktu perencanaan;
 - b. Indikator kinerja berupa ketersediaan ruang terbuka hijau serta persampahan masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan karena pekerjaan yang direncanakan belum dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

11. Walaupun capaian kinerja urusan Koperasi dan UKM yang diampu oleh Dinas Koperasi dan UKM sudah masuk dalam kategori sangat tinggi, namun ada beberapa kendala, diantaranya adalah :
 - a. Adanya efisiensi anggaran, sehingga tidak dapat maksimal dalam mengikuti kegiatan pameran.
 - b. Kesibukan pengurus/pengawas/pengelola koperasi sehingga tidak tepat waktu dalam mengikuti bimtek/pelatihan;
 - c. Laporan keuangan koperasi yang belum sesuai dengan standar akuntansi;
 - d. Kesulitan penyesuaian waktu antara Tim Dinas Koperasi UKM Salatiga dengan pengurus koperasi dalam koordinasi pemeriksaan kesehatan dan pengawasan koperasi;
 - e. Ada beberapa koperasi yang sudah melaksanakan RAT, tetapi tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas Koperasi dan UKM;
 - f. Koperasi belum menyampaikan laporan perkembangan (keragaan koperasi) setiap triwulan atau semester;
 - g. Koperasi belum menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi pemeriksaan kesehatan koperasi;
 - h. Ada beberapa faktor eksternal seperti data dari instansi lain yang dibutuhkan.
12. Pencapaian kinerja urusan Penanaman Modal yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masuk dalam kategori sangat tinggi, namun ada beberapa kendala, yaitu :
 - a. Kota Salatiga tidak memiliki lahan yang luas untuk investasi skala besar;
 - b. Ada beberapa kegiatan yang penilaiannya baru dapat dilakukan di akhir tahun, dan memerlukan penetapan resmi dari pemerintah pusat.
13. Pencapaian kinerja urusan Olahraga yang diampu oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga masuk dalam kategori sangat tinggi, namun ada beberapa kendala, yaitu :
 - a. Kegiatan olahraga banyak yang dilaksanakan dengan sistem berjenjang. Apabila di jenjang atasnya tidak dilaksanakan maka untuk jenjang di bawahnya tidak dapat dilaksanakan juga;
 - b. Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan kurang valid.
14. Pencapaian kinerja urusan Pariwisata yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masuk dalam kategori sangat tinggi, namun ada kendala, yaitu pelaksanaan event pariwisata menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat/provinsi/kota, sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan tidak sesuai dengan rencana awal.

15. Pencapaian kinerja urusan Perpustakaan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masuk dalam kategori sedang. Hal ini disebabkan karena :
 - a. Pemeliharaan sarana dan prasarana layanan sering kali tertunda karena terbatasnya anggaran pemeliharaan yang tersedia.
 - b. Tingginya konsumsi konten hiburan digital (media sosial, video pendek), menggeser minat membaca buku atau bahan bacaan bermutu lainnya.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan, penyimpanan, dan display koleksi naskah kuno.
16. Pencapaian kinerja urusan Kearsipan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masuk dalam kategori sangat tinggi, namun ada beberapa kendala, yaitu :
 - a. Masih ada perangkat dinas yang melakukan disposisi surat secara manual.
 - b. Pengunjung perpustakaan banyak yang belum memanfaatkan fasilitas daftar hadir pengunjung perpustakaan dalam bentuk QR code yang sudah disediakan.
 - c. Belum adanya penyerahan arsip statis dari perangkat daerah dan masyarakat umum.
17. Pencapaian kinerja urusan Perdagangan yang diampu oleh Dinas Perdagangan masuk dalam kategori tinggi, namun masih ada kendala, yaitu adanya efisiensi anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, sehingga capaian kinerja programnya belum bisa memenuhi target.
18. Walaupun pencapaian kinerja urusan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah masuk dalam kategori sangat tinggi, namun masih ada kendala yaitu ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai perencanaan karena mengikuti petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
19. Pencapaian kinerja urusan Pengawasan yang diampu oleh Inspektorat Daerah masuk dalam kategori sangat tinggi, namun ada beberapa kendala, diantaranya adalah :
 - a. Kurang optimalnya penyerapan anggaran di triwulan 4 karena adanya efisiensi anggaran, sehingga perencanaan yang sudah ditetapkan dalam anggaran kas belum terlaksana secara optimal;
 - b. Adanya kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal seperti Kementerian Dalam Negeri, BPKP, BPK, KPK, Kejaksaan Negeri, Kepolisian RI, Badan Pusat Statistik, dan pihak terkait lainnya yang pelaksanaannya sulit diprediksi, tergantung rencana dari instansi tersebut.
 - c. Adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan adanya penundaan pelaksanaan kegiatan, menyesuaikan dengan anggaran.

20. Pencapaian kinerja urusan Pemerintahan Umum yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masuk dalam kategori sangat tinggi, namun ada beberapa kendala, diantaranya adalah :
- a. Kurangnya koordinasi dengan mitra kerja;
 - b. Perencanaan yang kurang cermat;
 - c. Kurangnya kompetensi pegawai;
 - d. Pelaksanaan beberapa kegiatan yang bergantung pada kebijakan pusat/provinsi/kota.
21. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan masih memiliki beberapa permasalahan, antara lain :
- a. Tidak tersedianya data sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan.
 - b. Terdapat beberapa kegiatan yang penilaiannya dilakukan di akhir tahun dan memerlukan penetapan resmi dari pemerintah pusat terkait nilai capaiannya.
 - c. Pelaksanaan kegiatan masih banyak yang belum dilaksanakan sesuai dengan waktu perencanaan.
 - d. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai.
 - e. Pelaksanaan subfisik kegiatan untuk fisik sudah dilaksanakan, namun untuk administrasi SPJ dari pengelola kegiatan belum dilaksanakan secara maksimal.
 - f. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah terkait dengan pelaksanaan program kegiatan.
 - g. Kurang cermat dalam penyusunan anggaran.
 - h. Adanya ketergantungan dengan kebijakan pemerintah pusat/provinsi.
 - i. Adanya kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal seperti Kementerian Dalam Negeri, BPKP, BPK, KPK, Kejaksaan Negeri, Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik, serta pihak terkait lainnya yang pelaksanaannya sulit diprediksi, tergantung rencana dari institusi tersebut.
 - j. Ketersediaan data untuk mengukur kinerja yang tersedia di akhir tahun dan ada yang memerlukan penetapan dari Pemerintah Pusat.
 - k. Pengampu kegiatan tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

- a. Ketersediaan data realisasi kinerja yang belum terpenuhi pada triwulan 4 tahun 2025 mempengaruhi hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
- b. Jumlah program yang ada dalam RPD Tahun 2023-2026 sama dengan jumlah program dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 yaitu 172 program. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase program dalam RPD 2023-2026 yang sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar 100%.
- c. Jumlah program yang terdapat dalam Perubahan RKPD tahun 2025 telah sesuai dengan jumlah program pada APBD tahun 2025 yaitu sebanyak 172 program. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase program dalam Perubahan RKPD tahun 2025 yang sesuai dengan APBD Tahun 2025 adalah sebesar 100%.
- d. Jumlah kegiatan yang terdapat dalam Perubahan RKPD tahun 2025 sebanyak 504 kegiatan, dan dalam APBD tahun 2025 terdapat 504 kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase kegiatan dalam Perubahan RKPD tahun 2025 yang sesuai dengan APBD tahun 2025 adalah sebesar 100%.
- e. Jumlah subkegiatan dalam Perubahan RKPD tahun 2025 sebanyak 1.343 subkegiatan, dan dalam APBD tahun 2025 ada 1.343 subkegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase subkegiatan dalam Perubahan RKPD tahun 2025 yang sesuai dengan APBD Tahun 2025 adalah sebesar 100%.
- f. Jumlah anggaran yang terdapat dalam Perubahan RKPD tahun 2025 sebesar Rp1.112.589.534.731,00. Sedangkan jumlah anggaran dalam APBD tahun 2025 sebesar Rp1.134.849.392.788,00. Jumlah anggaran dalam Perubahan RKPD tahun 2025 yang masuk dalam APBD tahun 2025 sebesar Rp1.107.836.587.019,00. Ada anggaran yang tertinggal dalam Perubahan RKPD tahun 2025 sebesar Rp4.752.947.712,00 dan ada anggaran baru dalam APBD tahun 2025 sebesar Rp27.012.805.769,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase anggaran dalam Perubahan RKPD tahun 2025 yang masuk dalam APBD tahun 2025 sebesar 99,57%.

5.2 REKOMENDASI

Terhadap permasalahan yang ada, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perangkat daerah agar memenuhi data realisasi kinerja dengan menggunakan format pelaporan sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 dan melakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah setiap triwulan sebagaimana ketentuan yang berlaku serta mengirimkan laporan realisasi kinerja ke Bappeda Kota Salatiga sebagai dasar penyusunan evaluasi RKPD.
- b. Perangkat daerah agar mencermati data dukung yang terkait dengan laporan realisasi kinerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 setiap triwulan sebagai dasar penyusunan laporan realisasi kinerja sehingga dapat menyusun laporan secara tepat waktu dan tepat kaidah.
- c. Perangkat daerah agar mematuhi teknis pengisian format laporan sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017.
- d. Perangkat daerah agar menyusun rencana aksi pencapaian indikator program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran yang konsisten antara RPD, Renstra, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- e. Perangkat daerah agar melaksanakan proses input SIPD menyesuaikan dengan regulasi sistem dengan tetap berpedoman pada dokumen induk (RPD) yang telah ditetapkan.
- f. Perangkat daerah agar lebih aktif dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berpedoman pada evaluasi Renja.
- g. Perangkat daerah agar lebih konsisten dalam penyerapan anggaran sesuai aliran/ arus kas, dan menyusun arus kas yang relevan dengan rencana progres fisik.
- h. Perangkat daerah agar lebih cermat dalam penentuan target kegiatan, khususnya kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme tender.
- i. Koordinasi antara Bappeda dan perangkat daerah perlu lebih ditingkatkan dengan menggunakan mekanisme yang lebih efektif.

BAB VI PENUTUP

Monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Triwulan 4 tahun 2025 menjadi masukan untuk menyusun evaluasi RKPD Kota Salatiga tahun 2025. Monitoring dan evaluasi RKPD ini dapat menjadi gambaran efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan di tahun 2025 oleh masing-masing perangkat daerah pelaksana. Dalam monitoring dan evaluasi RKPD ini telah mencakup capaian indikator program, indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah, realisasi keuangan, dan realisasi fisik kegiatan pada triwulan 4 tahun 2025. Cakupan ini dapat digunakan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD tahun 2025 dapat dicapai.

Penyusunan monitoring dan evaluasi RKPD tahun 2025 ini telah mencermati potensi pembiayaan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota serta swadaya masyarakat agar terjadi sinergisitas dan sinkronisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pembangunan Kota Salatiga, baik yang berupa upaya pemecahan masalah atau pun pengembangan dan penggalian potensi daerah bukan hanya merupakan hasil kerja Pemerintah Kota Salatiga, namun juga berkat dukungan, kerja sama, peran pihak swasta, dan masyarakat Kota Salatiga dalam proses pembangunan Kota Salatiga, sehingga visi dan misi pembangunan Kota Salatiga dapat terwujud.

Demikian Monitoring dan Evaluasi RKPD Triwulan 4 Tahun 2025 ini disampaikan untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan menjadi acuan dalam penyusunan monitoring dan evaluasi RKPD berikutnya.

Salatiga, 15 Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kota Salatiga

Dr. Siswo Hartanto, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197305261992031001

LAMPIRAN FORMULIR E.60



**MONEV RKPD
TRIWULAN IV**

1. Dinas Pendidikan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					Dinas Pendidikan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A	%	100,00	117,02	117,02	
	APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B	%	100,00	135,55	135,55	
	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,01	0,00	100,01	
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,06	0,04	100,02	
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	88,44	85,11	96,23	
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	97,73	84,45	96,21	
	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,81	2,78	98,93	
	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,55	2,66	104,31	
	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,84	2,85	100,35	
	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,73	2,75	100,73	
	Persentase jumlah sekolah yang memenuhi kriteria minimum AKM jenjang SD/MI	%	97,85	97,85	100,00	
	Persentase jumlah sekolah yang memenuhi kriteria minimum jenjang SMP/MTs	%	91,67	100,00	109,09	
	APK PAUD	%	46,60	50,97	109,38	
	Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	%	78,07	78,07	100,00	
	Persentase kondisi kelas PAUD dalam kondisi baik	%	87,43	89,42	102,28	
	Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan Baik	%	95,45	94,74	99,26	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
	Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	%	74,19	74,19	100,00	
	Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	%	63,89	63,89	100,00	
	Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	%	75,00	75,00	100,00	
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang TK/RA	%	36,84	44,78	121,55	
	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SD	%	49,31	60,06	121,80	
	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	%	58,65	66,85	113,98	
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1 jenjang PAUD	%	87,80	88,26	100,52	
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1 jenjang MI	%	97,33	95,72	98,53	
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1 jenjang SMP	%	99,10	99,33	100,23	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
	Persentase TK/RA yang terakreditasi	%	90,35	89,57	99,14	
	Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi	%	83,33	100,00	120,00	
	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan yang berizin	%	92,86	92,86	100,00	
	Persentase Sekolah yang memiliki izin operasional jenjang SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase Sekolah yang memiliki izin operasional jenjang SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					
	Persentase sekolah yang mengembangkan model pembelajaran Bahasa Jawa jenjang SD/MI	%	20,43	20,43	100,00	
	Persentase sekolah yang mengembangkan model pembelajaran Bahasa Jawa jenjang SMP/MTs	%	42,86	42,86	100,00	
	Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata Pelajaran yang diberikan ke siswa	%	66,67	66,67	100,01	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					104,27	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	Ada peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan dasar			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	Pengampu kegiatan tidak bisa melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	Melakukan evaluasi berkala dan mencermati schedule yang telah disusun			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	Penyusunan perencanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan SDM yang ada			

2. Dinas Kesehatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					Dinas Kesehatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100,00	100,00	100,00	
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit	%	88,57	88,73	100,18	
	Cost Recovery	%	100,00	54,04	54,04	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	10,00	14,49	144,90	
	Angka penemuan kasus baru TBC/Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 penduduk	145,00	291,92	201,32	
	Angka penemuan Pneumonia Balita	%	57,00	95,83	168,12	
	Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	<1	0,24	26,67	
	Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	39,10	13,04	33,35	
	Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	78,00	76,00	97,44	
	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	88,00	76,36	86,77	
	Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan mendapat ASI eksklusif	%	80,00	82,07	102,59	
	Cakupan BIAS Campak Rubela	%	98,00	98,90	100,92	
	Cakupan BIAS DT/Td	%	98,00	99,00	101,02	
	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	%	99,00	100,00	101,01	
	Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan kepesertaan JKN	%	100,00	100,28	100,28	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (KF3)	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan Lansia	%	100,00	100,00	100,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
	Cakupan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan Orang Terduga TB	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	99,84	99,00	99,16	
	Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	99,44	99,44	100,00	
	Cakupan UCI kelurahan	%	100,00	100	100,00	
	Deteksi Dini Hepatitis	%	82,00	92,09	112,30	
	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	100,00	96,77	96,77	
	Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100rb penduduk	<7	3,49	50,58	
	Kasus HIV/AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	100,00	92,05	92,05	
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	%	86,90	84,79	97,57	
	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	95,68	74,53	77,90	
	Pembentukan Posyandu Remaja	unit	30,00	0	0,00	
	Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	5,00	7,00	140,00	
	Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,00	8	200,00	
	Persentase Ibu Hamil KEK	%	6,00	11,31	188,50	
	Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	7,43	5,77	77,66	
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100,00	100	100,00	
	Prevalensi Stunting pada Balita	%	6,51	6,4	98,31	
	Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	87,00	107,73	123,83	
	Persentase ketersediaan obat esensial di Puskesmas dan KPM	%	85,00	116,00	136,47	
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	100,00	100	100,00	
	Persentase RS rujukan yang terakreditasi	%	100,00	100	100,00	
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah	%	1,65	0,459	27,82	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
	Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1x24 jam	%	100,00	100	100,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	%	73,04	68,14	93,29	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	%	59,00	57,77	97,92	
	Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat	%	88,00	87,88	99,86	
	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	84,00	100	119,05	
	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	99,67	86,36	86,65	
	Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	90,00	90,87	100,97	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
	Cakupan desa siaga strata mandiri	%	100,00	100	100,00	
	Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	97,55	98,11	100,57	
	Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	97,40	99,35	102,00	
	Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100,00	100	100,00	
	Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	97,19	96,83	99,63	
	Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	94,34	94,92	100,61	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					100,53	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. 2. Transport kader kesehatan yang harus direalisasikan tepat waktu. 3. Barang tersedia di tempat pembelian resmi dalam penyediaan jasa surat menyurat. 4. Tersedianya SDM yang memahami tupoksi dan tanggung jawab masing-masing dalam pengadaan obat dan BHMP. 5. Barang mudah ditemui di pasaran dan kemudahan koordinasi dengan penyedia dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 6. Tagihan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan peserta JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Salatiga datang tepat waktu sehingga pembayaran dapat dilakukan tepat waktu.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Beberapa kegiatan yang bersumber dana DAK non fisik masih menunggu aturan terkait Perjadin ASN. 2. Durasi waktu yang cukup lama dalam menunggu izin pemeriksaan, sehingga kegiatan pengawasan obat dan makanan ke sarana distribusi tidak maksimal. 3. Tidak ada tenaga kesehatan yang mengajukan pelatihan karena sudah mengikuti pelatihan online.			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
			4. Kesadaran orang deng a HIV (ODHIV) untuk berobat masih kurang.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Segera melaksanakan kegiatan dan merealisasikan anggaran di triwulan 4. 2. Melakukan koordinasi dan memberikan penjelasan kepada penanggungjawab/pemilik toko/swalayan/supermarket. 3. Bekerjasama dengan LSM sebagai pendamping orang dengan HIV (ODHIV).			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1.Meningkatkan koordinasi lebih lanjut dengan tenaga kesehatan terkait pelatihan sesuai kompetensi 2.Memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia			

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					DPUPR
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86,00	88,75	103,20	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100,00	100,00	100,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum	%	94,00	93,20	99,15	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
	Persentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,68	92,01	96,16	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
	Persentase jaringan drainase kondisi baik	%	97,00	96,49	99,47	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
	Rasio kepatuhan IMB	%	88,00	87,67	99,63	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	100,00	100,00	100,00	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
	Persentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap	%	92,00	91,97	99,97	
	Persentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik	%	20,00	19,73	98,65	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	94,00	93,81	99,80	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	94,00	94,20	100,21	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					99,66	
Predikat					SANGAT TINGGI	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai regulasi 2. Pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal rencana pekerjaan. 3. Kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB/PBG. 4. Ketersediaan data kondisi jalan dan jembatan yang up to date karena dilakukan survei kondisi secara rutin. 5. Tersedia SDM dengan jumlah dan kualifikasi yang mencukupi. 6. Tersedia sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan. 7. Terdapat regulasi yang memadai sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. 8. Kesadaran tenaga operator/teknisi dalam mengajukan sertifikasi. 9. Regulasi yang jelas, aturan yang cenderung sudah lengkap (RTRW dan RDTR) dan sudah terintegrasi, sistem informasi (OSS). 10. Ketersediaan data informasi, informasi sudah bisa diakses secara mandiri (dengan aplikasi informasi tata ruang Si keren dan Si petarung) dan bisa pelayanan langsung di kantor.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Terbatasnya SDM dan anggaran. 2. Cuaca dan curah hujan yang tinggi menghambat penyelesaian proyek. 3. Kesadaran masyarakat terhadap infrastruktur masih kurang. 4. Penganggaran setiap pekerjaan masih terbatas. 5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB/PBG. 6. Ketersediaan anggaran belum mencukupi untuk melakukan penanganan pada semua ruas jalan. 7. Belum tersedia revisi SK Jalan sehingga belum semua jalan dapat ditangani. 8. Partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap infrastruktur yang masih rendah. 9. Terkendala koordinasi lintas OPD.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Mengawasi jalannya proyek sehingga bisa diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal. 2. Lebih memberdayakan SDM yang ada. 3. Meningkatkan pelayanan IMB/PBG sesuai SOP. 4. Penanganan kondisi ruas jalan dan jembatan berdasarkan skala prioritas. 5. Optimalisasi capaian progres pelaksanaan pekerjaan dengan lembur dan penambahan tenaga kerja. 6. Mengusulkan penambahan anggaran dan SDM. 7. Terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik berupa sosialisasi langsung maupun lewat sosial media. 8. Mendorong/mengupayakan sinergi, kerjasama dan koordinasi antar perangkat daerah, masyarakat dan swasta.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan masyarakat. 2. Penambahan anggaran dan SDM yang berkualitas. 3. Penganggaran per pekerjaan dimaksimalkan. 4. Meningkatkan sosialisasi IMB/PBG ke masyarakat. 5. Pengusulan anggaran sesuai kebutuhan. 6. Revisi SK Jalan segera diterbitkan. 7. Meningkatkan sosialisasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam sertifikasi personilnya.			

4. DPKP (Perumahan)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					DPKP
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,00	86,41	96,01	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota	%	66,67	15,00	22,50	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	%	75,00	0,00	0,00	
	Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan	%	75,00	100,00	133,33	
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	11,27	36,47	32,60	
	Terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP)	%	0,00	0,00	0,00	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	7,18	4,45	61,98	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan	%	55,00	56,29	102,35	
	Terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU	%	18,34	20,00	109,05	
	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU	%	8,00	10,23	127,88	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					97,67	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Ketersediaan anggaran dalam dokumen anggaran.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Sebagian besar merupakan pekerjaan fisik, sehingga pada triwulan 1 masih dalam proses perencanaan, dan monev evaluasi pada triwulan 4.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan di anggaran kas.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Melaksanakan perencanaan penganggaran sesuai RKPD.			

5. Satpol PP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT					Satpol PP
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,00	89,25	101,42	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Persentase penegakan Perda dan Per Ka Da	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
	Persentase ketersediaan sarana prasarana Damkar yang memadai	%	75,00	80,00	106,67	
	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran	%	85,00	100,00	117,65	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					104,29	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Ketersediaan anggaran dan SK Tim. 2. Tim yang berkompeten.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Masih tingginya pelanggaran poduk hukum daerah. 2. Penyelenggaraan trantibum dan linmas yang belum optimal. 3. Kelengkapan administrasi yang terlambat. 4. Kegiatan yang membutuhkan koordinasi dengan perangkat daerah lain membutuhkan waktu. 5. Masih ada revisi kelengkapan administrasi kegiatan sehingga pengajuan spj menjadi terhambat. 6. Adanya kekurangan anggota tim karena jadwal kegiatan yang berbarengan dengan kegiatan lain. 7. Usia kendaraan khusus damkar yang sudah tua. 8. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk cepat melapor ketika terjadi musibah kebakaran.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Menyelenggarakan sosialisasi peraturan daerah. 2. Melengkapi kekurangan kekurangan administrasi SPJ kegiatan. 3. Menjalin koordinasi yang lebih baik dengan perangkat daerah terkait untuk kelancaran kegiatan. 4. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan ransus. 5. Memberikan himbauan kepada masyarakat terkait kebencanaan. 6. Melakukan evaluasi dan perbaikan untuk kelancaran kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 7. Merencanakan kegiatan yang lebih variatif dan dapat meningkatkan pencapaian kinerja sesuai dengan agenda pemerintah.			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
			8. Memberikan informasi kepada Kasiepemtrantib masing-masing kelurahan untuk memberikan informasi ke setiap anggota Satlinmas di kelurahan dengan batas waktu yang telah ditentukan.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Memperbanyak sosialisasi perda kepada masyarakat dan pembinaan terhadap linmas. 2. Mengusulkan pembaruan kendaraan khusus damkar. 3. Menyusun rencana program kerja perangkat daerah yang komprehensif dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan visi dan misi wali kota sesuai dengan kewenangan perangkat daerah. 5. Melakukan evaluasi dan perbaikan demi kelancaran kegiatan berdasar ketentuan yang berlaku.			

6. BPBD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT					BPBD
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,00	88,15	101,32	
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase kecukupan sarana dan prasaana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik	%	38,30	38,00	99,22	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					100,11	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Ketersediaan anggaran dalam dokumen anggaran.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1.Kejadian bencana tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. 2.Ada beberapa pengadaan yang spesifikasinya belum sesuai dengan barang yang ada di pasaran.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1.Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan. 2.Mengajukan standarisasi harga sesuai denga kebutuhan dan harga pasar.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1.Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat.			

7. Dinas Sosial

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					Dinas Sosial
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,00	90,49	100,54	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
	Persentase terbentuknya Lembaga Puskesmas	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase PSKS yang dibina	%	98,87	100,00	101,14	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			100,00		
	Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase anak telantar yang mempeoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			100,00		
	Persentase penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lansia telantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase data fakir miskin yang divalidasi	%	97,70	97,69	99,99	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			100,00		
	Cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100,00	100,00	100,00	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					100,32	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	Komitmen dan kerjasama pengampu kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan tetapi belum dilakukan pencairan. 2. Melaksanakan perencanaan terhadap kemungkinan adanya efisiensi anggaran.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	Perhitungan perencanaan dengan lebih cermat			

8. Disperinaker (Tenaga Kerja)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					Disperinaker
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
	Persentase pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	%	100,00	205,00	205,00	
	Perentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	100,00	1,02	1,02	
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
	Persentase realisasi kegiatan Bursa Tenaga Kerja	%	100,00	103,33	103,33	
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	100,00	73,68	73,68	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	93,66	91,71	97,92	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					96,19	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Komitmen dan kerjasama pengampu kegiatan dalam melaksanakan kegiatan.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Penjadwalan pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Menjadwalkan pelaksanaan kegiatan dengan lebih tepat. 2. Menperhitungkan segala aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.			

9. DP3APPKB (Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK					DP3APPKB
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,00	89,32	100,36	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
	Persentase kelembagaan PUG aktif	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,24	6,00	64,94	
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase perempuan di legislatif	%	24,00	8,00	33,33	
3	PROGRAM PELINDUNGAN PEREMPUAN					
	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan	%	44,00	69,63	158,25	
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	25,00	25,00	100,00	
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
	Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem gender dan anak	%	100,00	100,00	100,00	
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
	Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak	%	6,80	1,55	22,79	
7	PROGRAM PELINDUNGAN KHUSUS ANAK					
	Persentase anak korban kekerasan	%	0,06	0,06	100,00	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					89,06	
Predikat					TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Komitmen dari para pimpinan untuk melaksanakan PUG dalam pemerintahan Kota Salatiga. 2. Dilakukan KIE terus menerus mengenai penanganan kasus kekerasan. 3. Keberhasilan KIE penanganan kasus kekerasan sehingga masyarakat berani untuk melaporkan kasus kekerasan. 4. Komitmen dari Lintas Sektor dalam mendukung penanganan kasus kekerasan.			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satua n	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Keterbatasan personil dan sarpras yang belum maksimal. 2. Stigma lingkungan yang masih malu jika terdapat kasus kekerasan, sehingga masih banyak kasus kekerasan yang belum diketahui secara jelas.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Dilaksanakan monev rutin. 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Mencermati kembali kegiatan yang tidak bisa dilakukan pada tahun anggaran yang berjalan sebagai evaluasi untuk perencanaan di tahun berikutnya.			

10. Dinas Pangan dan Pertanian (Pangan)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Dinas Pangan dan Pertanian
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,89	89,13	100,27	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					
	Penyediaan infrastruktur pangan	%	92,69	93,02	100,36	
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
	Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	%	94,11	90,95	96,64	
	Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER)	Skor PoU	5,02	4,67	93,03	
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
	Persentase penanganan rumah tangga rawan pangan	%	10,20	74,37	729,12	
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
	Persentase pangan segar aman	%	98,00	87,18	88,96	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					201,40	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Ketersediaan anggaran untuk mendukung kelancarana kegiatan. 2. Sumber daya manusia yang berkompeten.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, karena ada efisiensi anggaran.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis. 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Adanya anggaran yang mendukung sarana dan prasarana kelancaran kegiatan. 2. Mengevaluasi anggaran yang lebih cermat lagi.			

11. DPKP (Pertanahan)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					DPKP
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	100,00	100,00	100,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					
	Persentase bidang tanah yang terdata dan terpetakan	%	0,00	0,00	0,00	
	Persentase data rupa bumi yang tersedia	%	75,00	100,00	133,33	
	Persentase penyertifikatan tanah hasil pengadaan, PSU, dan TPU	%	100,00	100,00	100,00	
3	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					
	Cakupan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	9,00	100,00	1.111,11	
	Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	75,00	100,00	133,33	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					262,96	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Ketersediaan anggaran dalam dokumen anggaran.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Sebagian besar merupakan pekerjaan fisik, sehingga pada triwulan 1 masih dalam proses perencanaan, dan monev evaluasi pada triwulan 4.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan di anggaran kas.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Melaksanakan perencanaan penganggaran sesuai RKPD			

12. Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satua n	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Dinas Lingku ngan Hidup
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84,00	84,17	100,20	
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
	IKPLHD	Dokum en	1,00	1	100,00	
	KLHS	Dokum en	0,00	0	-	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
	Pemantauan Status Mutu Air	%	100,00	100	100,00	
	Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium	%	100,00	100	100,00	
	Persentase Konservasi Lahan	%	15,00	15	100,00	
	Persentase Konservasi Sumber Mata Air	%	30,00	30	100,00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
	Persentase ruang terbuka hijau	%	17,40	17,4	100,00	
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)					
	Persentase penyimpanan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan	%	30,00	30	100,00	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
	Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	100,00	82,14	82,14	
	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan	%	32,00	69,42	216,94	
	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100,00	100	100,00	
	Persentase tersusunnya dokumen IGRK	%	100,00	100	100,00	
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
	Persentase penghargaan lingkungan tingkat kabupaten/kota	%	100,00	100	100,00	
	Persentase penerima penghargaan tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat provinsi	%	100,00	100	100,00	
	Peningkatan kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup	%	40,00	40	100,00	
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
	Persentase pengurangan sampah	%	30,00	22,81	76,03	
	Persentase penanganan sampah	%	71,00	75,63	106,52	
	Persentase pengangkutan sampah	%	71,00	75,63	106,52	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					99,39	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Ketepatan dalam mengaplikasi dan merealisasikan kinerja berdasarkan perencanaan dan anggaran kas.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Proses pelaksanaan kegiatan masih banyak yang belum dilaksanakan sesuai dengan waktu perencanaan.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar bisa dilaksanakan sesuai perencanaan.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Percepatan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perencanaan.			

13. Dukcapil

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN SIPIL					Dinas Dukcapil
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,85	91,44	100,51	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
	Cakupan penduduk perekaman KTP-el	%	98,00	97,69	101,55	
	Persentase penerbitan KIA 0-5 th	%	86,00	87,46	109,60	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th	%	99,76	99,79	100,90	
	Persentase Akta Perkawinan non muslim	%	100,00	100,00	100,00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
	Ketersediaan database kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					102,09	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi. 2. Adanya Perjanjian Kerjasama Pelayanan Terintegrasi dengan Rumah Sakit di Salatiga yang menunjang tercapainya cakupan penerbitan KIA dan akta kelahiran. 3. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang prosedur pengurusan administrasi kependudukan melalui sosialisasi dengan kalender.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Banyak masyarakat yang kurang memahami tentang regulasi administrasi kependudukan.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Melakukan sosialisasi tentang admistrasi kependudukan melalui website dan media sosial.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Melakukan sosialisasi tentang admistrasi kependudukan melalui kalender, website dan media sosial.			

14. DP3APPKB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satu an	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					DP3APPK B
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
	Cakupan pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	%	100,00	100,00	100,00	
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR)	%	0,63	0,63	100,00	
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	0,07	0,07	100,00	
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	tahun	23,00	23,00	100,00	
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA					
	Rasio akseptor KB baru	%	14,31	14,31	100,00	
	Cakupan peserta KB aktif	%	67,70	67,70	100,00	
	Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	rasio	1:2,3	1:2,5	108,00	
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 thn	%	67,70	67,70	100,00	
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	8,51	8,51	100,00	
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	26,65	27,57	103,45	
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	%	100,00	100,00	100,00	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	rasio	1:2	1:1,9	94,74	
	Cakupan Balita/Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	100,00	99,66	99,66	
	Cakupan perkawinan usia di bawah 21 tahun	%	0,39	0,39	100,00	
	Cakupan kader BKB yang terlatih	%	75,00	53,69	71,59	
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	96,00	97,47	101,53	
	Persentase Baduta Stunting	%	5,75	5,75	100,00	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					98,83	
Predikat					SANGAT TINGGI	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satu an	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Komitmen dari semua pihak untuk mendukung Program Banggan Kencana. 2. Dilaksanakan KIE terus menerus dan reword sehingga masyarakat berminta dan percaya untuk ber-KB.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Keterbatasan personil dan sarpras yang belum maksimal.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin. 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Mencermati kembali kegiatan yang tidak bisa dilakukan pada tahun anggaran yang berjalan sebagai evaluasi untuk perencanaan di tahun berikutnya.			

15. Dinas Perhubungan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
H	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					Dinas Perhubungan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,82	95,70	108,97	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
	Persentase rambu-rambu terpasang	%	89,00	89,00	100,00	
	Persentase layanan angkutan darat	%	29,00	27,53	94,93	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					101,30	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Adanya dukungan anggaran dan SDM yang baik 2. Kerjasama internal dan eksternal (stakeholder, pihak ketiga) yang baik.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Adanya rasionalisasi dan efisiensi anggaran.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Mengoptimalkan sumber daya dan sumber dana yang ada dalam pemenuhan kebutuhan, maupun prioritas target kinerja.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Melakukan perencanaan kegiatan sesuai dengan target kinerja berbasis prioritas kebutuhan dan mengupayakan sumber dana lainnya selain APBD.			

16. Dinas Komunikasi dan Informatika (Komunikasi dan Informatika)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					Dinas Kominfo
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85,00	81,08	95,39	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,00	16,52	16,52	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					77,98	
Predikat					TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Kerja sama dan koordinasi antar tim dan stakeholder. 2. Perencanaan yang sudah sesuai dengan keinginan perangkat daerah.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai. 2. Kurangnya anggaran dan SDM untuk penyebarluasan informasi dan kegiatan stakeholder. 3. Proses pengadaan menggunakan Gratis Ongkir dimana administrasi pencairan belum jelas.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat. 2. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan IKM. 3. Memberdayakan semua SDM yang ada.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Melakukan perencanaan anggaran yang lebih baik dan lebih cermat. 2. Mengusulkan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik agar capaian IKM bisa meningkat. 3. Penambahan SDM dan anggaran untuk stakeholder. 4. Sosialisasi dan koordinasi proses pengadaan dilaksanakan di akhir tahun agar memudahkan dalam proses pengadaan.			

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
J	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					Dinas Koperasi dan UKM
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85,43	86,66	101,44	
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
	Persentasi koperasi yang berkualitas	%	73,96	71,88	97,19	
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	%	53,12	53,53	100,77	
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	%	83,91	85,07	101,38	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI					
	Persentase akses pasar anggota koperasi	%	75,00	87,50	116,67	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	%	24,90	25,93	104,14	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	48,32	48,80	157,12	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					111,24	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Adanya peraturan pemeriksaan penilaian kesehatan koperasi yang wajib dilakukan minimal 1 tahun sekali. 2. Perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik. 3. Adanya delegasi dan koordinasi yang baik dari PPTK ke bendahara serta anggota tim. 4. Peningkatan pemahaman pengurus koperasi dalam memahami data isian keras kerja pemeriksaan kesehatan koperasi sehingga kertas kerja dapat diproses atau dinilai. 5. Peningkatan pemahaman pengurus dan pengawas dalam memahami peraturan sehingga kegiatan kegiatan simpan pinjam yang dijalankan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Pengurus dan Pengawas Koperasi kooperatif dalam kerjasama dengan Tim Dinas Koperasi UKM Salatiga.			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satua n	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kot a Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
			7. Data UKM yang sudah mulai terintegrasi dengan baik dan dibuat bank data untuk seluruh pelaku usaha di Kota Salatiga.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Adanya efisiensi anggaran, sehingga ketika mengikuti pameran hanya sewa stand kecil. 2. Kesibukan pengurus/pengawas/pengelola koperasi sehingga tidak tepat waktu dalam mengikuti bimtek/pelatihan. 3. Laporan keungan koperasi yang belum sesuai dengan standar akuntansi. 4. Kesulitan penyesuaian waktu antara Tim Dinas Koperasi UKM Salatiga dengan Pengurus Koperasi dalam koordinasi pemeriksaan kesehatan dan pengasan koperasi. 5. Ada beberapa koperasi yang sudah melaksanakan RAT, tetapi tidak menyampaikan pemberitahuan ke Dinas Koperasi dan UKM. 6. Koperasi belum menyampaikan laporan perkembangan (keragaan koperasi) setiap triwulan atau semester. 7. Koperasi belum menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi pemeriksaan kesehatan koperasi. 8. Adanya faktor eksternal seperti data dari instansi lain yang dibutuhkan (perbankan), yang belum ada laporannya.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Persiapan dan koordinasi yang baik dengan pengurus/pengawas/pengelola koperasi sebelum dan selama pelatihan. 2. Melakukan teknis pemeriksaan kesehatan koperasi dengan metode yang efektif. 3. Menyampaikan surat pemberitahuan terkait kewajiban koperasi untuk mengirim laporan perkembangan setiap triwulan atau semester dan surat teguran apabila koperasi tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan kesehatan koperasi. 4. Berkoordinasi dengan stakeholder agar seluruh capaian kinerja bisa tercapai.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Membuat perencanaan program yang lebih menarik. 2. Merencanakan program kegiatan dengan matang agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai jadwal.			

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
K	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					DPMPTSP
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,00	92,18	103,57	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	Rupiah (Milyar)	635,00	1123,13	191,39	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
	Persentase kenaikan jumlah minat investasi berskala nasional (PMA dan PMDN)	%	10,00	10,53	105,26	
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
	Persentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	%	98,30	99,94	101,66	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
	Persentase kenaikan jumlah LKPM yang masuk	%	54,16	8,15	15,04	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
	Persentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola	%	10,00	14,92	149,19	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					111,02	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	Kemudahan perizinan berusaha sesuai risiko yang dilayani lewat Mal Pelayanan Publik.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	Kurang lahan yang luas untuk investasi besar.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	Menyusun aturan yang memberikan insentif investasi sehingga menarik minat penanaman modal.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	Penguatan potensi lokal melalui jalinan komunikasi dengan pengusaha asal Kota Salatiga yang sukses di luar daerah untuk kembali menanam investasi di tanah kelahirannya.			

19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
L	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					Dispora
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,00	82,78	103,48	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
	Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	5,44	3,00	55,15	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
	Persentase atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	%	27,00	18,00	66,67	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
	Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas kepramukaan	%	70,00	65,00	92,86	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					79,54	
Predikat					TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Ketersediaan SDM baik itu dari internal maupun eksternal.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Kegiatan olahraga banyak dengan sistem berjenjang, apabila jenjang di atasnya tidak dilaksanakan maka untuk jenjang di bawahnya otomatis tidak dapat dilaksanakan juga. 2. Kurang validnya data sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Melakukan koordinasi ke provinsi maupun nasional apakah kegiatan yang ada akan tetap dilaksanakan atau dibatalkan. 2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Merencanakan kegiatan pendataan sebagai dasar perencanaan kegiatan. 2. Melakukan sinkronisasi kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai.			

20. Dinas Komunikasi dan Informatika (Statistik)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
M	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					Dinas Kominfo
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Sudah ada koordinasi di dalam lingkup perangkat daerah. 2. Kerja sama dan koordinasi antar tim dan stakeholder. 3. Perencanaan yang sudah sesuai dengan keinginan perangkat daerah. 4. Kerjasama antar tim, inisiatif, kreatif dan regulasi. 5. Memiliki SOP dan sistem aplikasi berbasis web yang membantu dalam pelaksanaan program. 6. Perubahan lingkungan eksternal dan internal tidak mempengaruhi kinerja.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai. 2. Kurangnya anggaran dan SDM untuk penyebarluasan informasi dan kegiatan stakeholder. 3. Proses pengadaan menggunakan Gratis Ongkir dimana administrasi pencairan belum jelas. 4. Perangkat Daerah kurang komitmen dalam pengelolaan Satu Data. 5. Keselarasan program kerja dengan regulasi belum didukung oleh komitmen bersama untuk capaian kinerja. 6. Perangkat Daerah kurang komitmen dalam melaksanakan pengamanan informasi.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat. 2. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan IKM. 3. Memberdayakan semua SDM dan anggaran yang ada. 4. Adanya kesepahaman administrasi SPJ antara PBJ dan BPKPD 5. Perbaikan kinerja dan mengikuti perkembangan kebutuhan Perangkat Daerah maupun masyarakat. 6. Mengoptimalkan perencanaan anggaran dengan lebih cermat.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Melakukan perencanaan yang lebih baik dan lebih cermat. 2. Mengusulkan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik agar capaian IKM bisa meningkat. 3. Penambahan SDM dan anggaran untuk stakeholder. 4. Sosialisasi dan koordinasi proses pengadaan dilaksanakan di akhir tahun agar memudahkan dalam proses pengadaan.			

21. Dinas Komunikasi dan Informatika (Persandian)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
N	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					Dinas Kominfo
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
	Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	%	73,00	70,85	97,05	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					97,05	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Sudah ada koordinasi di dalam lingkup perangkat daerah. 2. Kerja sama dan koordinasi antar tim dan stakeholder. 3. Perencanaan yang sudah sesuai dengan keinginan perangkat daerah. 4. Kerjasama antar tim, inisiatif, kreatif dan regulasi. 5. Memiliki SOP dan sistem aplikasi berbasis web yang membantu dalam pelaksanaan program. 6. Perubahan lingkungan eksternal dan internal tidak mempengaruhi kinerja.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di triwulan 1, 2, 3, dan 4. 2. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai. 3. Kurangnya anggaran dan SDM untuk penyebarluasan informasi dan kegiatan stakeholder. 4. Proses pengadaan menggunakan Gratis Ongkir dimana administrasi pencairan belum jelas. 5. Perangkat Daerah kurang komitmen dalam pengelolaan Satu Data. 6. Keselarasan program kerja dengan regulasi belum didukung oleh komitmen bersama untuk capaian kinerja. 7. Perangkat Daerah kurang komitmen dalam melaksanakan pengamanan informasi.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat. 2. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan IKM. 3. Memberdayakan semua SDM dan anggaran yang ada. 4. Adanya kesepahaman administrasi SPJ antara PBJ dan BPKPD 5. Perbaiki kinerja dan mengikuti perkembangan kebutuhan Perangkat Daerah maupun masyarakat. 6. Mengoptimalkan perencanaan anggaran dengan lebih cermat.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Melakukan perencanaan anggaran yang lebih baik dan lebih cermat. 2. Mengusulkan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik agar capaian IKM bisa meningkat. 3. Penambahan SDM dan anggaran untuk stakeholder. 4. Sosialisasi dan koordinasi proses pengadaan dilaksanakan di akhir tahun agar memudahkan dalam proses pengadaan.			

23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Perpustakaan)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
P	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					Dinpersip
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,21	85,38	102,61	
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
	Nilai tingkat kegemaran membaca	Nilai	85,83	75,23	87,65	
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
	Persentasi koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan	%	100,00	25,00	25,00	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					71,75	
Predikat					SEDANG	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan serta tersedianya berbagai platform layanan aduan untuk menjangkit kritik dan saran dari masyarakat pengguna layanan. 2. Ketersediaan perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, TBM, dan pojok baca yang relatif mudah diakses masyarakat. 3. Tingginya potensi naskah kuno yang ada di Kota Salatiga yang belum teridentifikasi dan potensi kerusakan pada naskah kuno tersebut.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Pemeliharaan sarana prasarana layanan sering kali tertunda karena terbatasnya anggaran pemeliharaan yang tersedia. 2. Tingginya konsumsi konten hiburan digital (media sosial, video pendek) menggeser minat membaca buku atau bahan bacaan bermutu. 3. Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan, penyimpanan dan display koleksi naskah kuno.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Koordinasi lebih intensif dengan pihak eksternal terkait pelaksanaan kegiatan.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Membuka forum konsultasi publik amara pemustaka dengan masyarakat yang aktif menggunakan layanan perpustakaan dan kearsipan. 2. Mengembangkan pendekatan literasi adaptif dengan memanfaatkan media digital sebagai pintu masuk minat baca. 3. Pengadaan sarana pelestarian naskah kuno dan peningkatan kapasitas pustakawan dan masyarakat dalam rangka pelestarian naskah kuno yang ada di Kota Salatiga.			

24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Kearsipan)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Q	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					Dinpersip
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	100,00	100,00	100,00	
2	PROGRAM PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
	Persentase jumlah arsip yang diselamatkan	%	100,00	45,67	45,67	
3	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
	Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip	%	100,00	1.315,16	1.315,16	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					486,94	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Penggunaan aplikasi Srikandi di setiap perangkat daerah. 2. LKD telah melakukan sosialisasi mengenai akuisisi arsip. 3. Adanya kerjasama dengan sekolah untuk memanfaatkan layanan kearsipan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Masih ada perangkat daerah yang melakukan disposisi surat secara manual. 2. Pengunjung perpustakaan (selain pelajar) belum mengisi daftar hadir pengunjung dalam bentuk QR code yang disediakan. 3. Belum adanya penyerahan arsip statis dari masyarakat.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Melakukan pembinaan, sosialisasi, dan bimtek kearsipan. 2. Monitoring dan evaluasi berkala kearsipan. 3. Pendampingan pengelolaan kearsipan bagi perangkat daerah. 4. Pengelolaan kearsipan bagi masyarakat.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Pendampingan pengelolaan arsip di perangkat daerah. 2. Mengingatkan kembali kepada perangkat daerah untuk menyerahkan arsip statisnya. 3. Meningkatkan promosi pelayanan kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.			

25. Dinas Pangan dan Pertanian (Kelautan dan Perikanan)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					Dinas Pangan dan Pertanian
	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	%	35,00	35,00	100,00	
2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase kelompok-kelompok pengolah dan pemaaaar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	%	35,00	35,00	100,00	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Ketersediaan anggaran untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. 2. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten. 3. Penjadwalan kegiatan yang tepat.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena ada efisiensi anggaran.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Melakukan evaluasi anggaran dengan lebih cermat.			

26. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Pariwisata)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					Disbudpar
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
	Persentase obyek wisata yang ditingkatkan	%	100,00	100,00	100,00	
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
	Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata	%	100,00	100,00	100,00	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PELINDUNGAN HAK KEKAYAAAN INTELEKTUAL					
	Persentase pengelolaan ekonomi kreatif	%	100,00	100,00	100,00	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
	Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	%	100,00	100,00	100,00	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Perencanaan anggaran dan penjadwalan kegiatan yang tepat. 2. Ketersediaan anggaran. 3. Adanya kesamaan komitmen antara pimpinan, staf, dan stakeholder dalam melaksanakan kegiatan.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Ketergantungan event dengan kebijakan pusat/provinsi/kota, sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan tidak sesuai dengan rencana awal. 2. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di triwulan 2,3, dan 4.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. 2. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat. 2. Percepatan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan berdasarkan perencanaan. 3. Peningkatan komitmen antara pimpinan, staf, stakeholder, maupun perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan program kegiatan.			

27. Dinas Pangan dan Pertanian (Pertanian)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					Dinas Pangan dan Pertanian
	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	%	75,00	75,00	100,00	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
	Pemenuhan kebutuhan prasana pertanian	%	75,00	75,00	100,00	
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHAAN MASYARAKAT VETERINER					
	Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis	%	0,00	0,00	100,00	
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
	Persentase kejadian bencana pertanian	%	0,00	0,00	100,00	
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani					
	Pemula	%	58,56	60,00	102,46	
	Lanjut	%	58,56	74,00	126,37	
	Madya	%	17,74	22,00	124,01	
	Utama	%	2,60	0,00	0,00	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					94,10	
Predikat					TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Ketersediaan anggaran yang mendukung kelancaran kegiatan. 2. Adanya sumber daya manusia yang kompeten.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	Beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena ada erisiensi anggaran.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Menyusun anggaran yang dapat mendukung sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan. 2. Melakukan evaluasi anggaran yang lebih cermat lagi.			

28. Dinas Perdagangan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Dinas Perdagangan
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86,68	85,96	99,17	
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
	Persentase jumlah perizinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan	%	20,00	20,00	100,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PEDAGANGAN					
	Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar	%	95,00	95,00	100,00	
	Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina	%	85,00	85,00	100,00	
	Persentase kelompok PKL yang dibina	%	51,00	51,00	100,00	
	Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL	%	34,00	34,00	100,00	
	Persentase PKL yang menempati Lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL	%	36,00	36,00	100,00	
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
	Persentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk	%	100,00	100,00	100,00	
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	%	26,00	26,00	100,00	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
	Persentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga	%	90,00	0,00	0,00	
6	PROGRAM STANDARISASI DAN PELINDUNGAN KONSUMEN					
	Persentase alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah	%	90,00	19,54	21,71	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					83,99	
Predikat					TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana perekonomian daerah dan pelaksanaan kegiatan. 2. Tersedianya SDM yang memadai.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena efisiensi anggaran.			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Memaksimalkan realisasi pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Mengalokasikan anggaran kegiatan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga. 2. Meningkatkan sarana prasarana perekonomian daerah, peningkatan akses pasar dan promosi bagi potensi unggulan di daerah, peningkatan kelancaran arus distribusi kepokmas 3. Peningkatan akses pasar 4. Melakukan promosi untuk meningkatkan potensi unggulan daerah. 5. Peningkatan kelancaran arus distribusi kepokmas.			

29. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perindustrian)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Disperinaker
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,88	88,31	99,36	
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
	Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang	%	0,38	0,31	82,31	
3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	9,54	9,54	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	1,41	0,00	0,00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
	Persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	%	13,30	16,87	126,86	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					63,61	
Predikat					RENDAH	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	Komitmen dan kerjasama pengampu kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	Penjadwalan pelaksanaan kegiatan yang kurang tepat.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	Menjadwalkan dan memperhitungkan segala aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.			

30. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Transmigrasi)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					Disperinaker
	Persentase pelaksanaan proses transmigrasi	%	100,00	40,00	40,00	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					40,00	
Predikat					SANGAT RENDAH	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	Jumlah kuota calon transmigran yang diberikan oleh pemerintah pusat.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	Adanya ketergantungan dengan kebijakan pemerintah pusat/provinsi.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	Tetap melaksanakan program transmigrasi untuk mengakomodir masyarakat yang berkeinginan ikut transmigrasi.			

31. Sekretariat Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
A	SEKRETARIAT DAERAH					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Sekretariat Daerah
	Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas	%	100	97,89	97,89	
	Persentase kegiatan Administrasi Umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi	%	100	100	100,00	
	Cakupan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	%	100	99,6	99,60	
	Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan	%	100	89,47	89,47	
	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	100	100	100,00	
	Skor LPPD	Nilai	3,1	100	3.225,81	
	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 Maret)	%	100	100	100,00	
	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang hukum	%	100	100	100,00	
	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	%	100	100	100,00	
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
	Cakupan koordinasi program perekonomian dan pembangunan	%	100	74,58	74,58	
	Cakupan koordinasi OPD pengampu DBHCHT	%	100	90,47	90,47	
	Cakupan koordinasi dan pembinaan BMUD/BLUD	%	100	23,75	23,75	
	Cakupan koordinasi bidang lingkungan hidup dan SDA	%	100	90,57	90,57	
	Cakupan koordinasi POK	%	100	100	100,00	
	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	84,00	100	119,05	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					288,20	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Kemampuan dan keahlian individu, motivasi, kepribadian, komitmen, dan kepemimpinan yang efektif. 2. Lingkungan kerja yang mendukung, budaya organisasi yang positif. 3. Kepemimpinan yang efektif.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Beban kerja yang berlebihan. 2. Berkurangnya motivasi dan disiplin kerja.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Menganalisis pencapaian kinerja triwulan sebelumnya. 2. Menyusun strategi untuk mencapai target yang belum tercapai.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Menyusun strategi untuk mencapai target yang belum tercapai, yang akan diimplementasikan dalam dokumen perencanaan tahun selanjutnya.			

32. Sekretariat DPRD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
B	SEKRETARIAT DPRD					
1	PROGRAM ADMINISITRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA					Sekretariat DPRD
	Tingkat kepuasan DPRD dalam fasilitasi pelayanan kesekretariatan	%	94,85	100,00	105,43	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI					
	Cakupan fasilitasi fungsi Legislasi	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran	%	100,00	100,00	100,00	
	Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan	%	100,00	95,00	95,00	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					100,11	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Jadwal pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun. 2. Komitmen pengampu kegiatan. 3. Kerjasama antarbagian untuk pelaksanaan kegiatan. 4. Koordinasi dan kerjasama tiap bagian untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan mematuhi jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tidak sesuai dengan perencanaan anggaran kas yang telah disusun pada saat perencanaan. 2. Pelaksanaan dan pencairan anggaran ada beberapa yang belum sesuai jadwal yang telah direncanakan sehingga perputaran UP tidak maksimal. 3. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan berikutnya sehingga belum ada realisasi anggaran.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Evaluasi dan monitoring untuk pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya. 2. Melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 3. Meningkatkan koordinasi dengan pengelola kegiatan agar pelaksanaan subkegiatan dapat berjalan lancar. 4. Mengalihkan dan menggeser rincian belanja yang belum sesuai dengan kaidah penganggaran			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Merencanakan kegiatan dengan menyusun jadwal pelaksanaan per subkegiatan dan melaksanakan pengendalian antarbagian dengan melaksanakan koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Evaluasi jadwal dan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan agar sesuai dengan jadwal yang telah disusun agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan program kegiatan setiap triwulannya dengan melihat hasil evaluasi triwulan sebelumnya. 3. Dalam menyusun anggaran memperhatikan kaidah dan peraturan terkait dengan perencanaan anggaran.			

33. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Perencanaan)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
A	PERENCANAAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					BAPPEDA
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,00	82,60	99,52	
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
	Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah	%	98,00	98,24	100,24	
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
	Penjabaran konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	%	98,00	100,00	102,04	
	Penjabaran konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	%	90,00	98,86	109,84	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					102,91	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Adanya perencanaan anggaran dan sarpras pendukung kegiatan. 2. Adanya komitmen bersama dalam mencapai tujuan organisasi. 3. Adanya koordinasi internal perangkat daerah. 4. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Koordinasi internal dan eksternal yang kurang maksimal. 2. Keterlambatan dalam pengadministrasi kegiatan. 3. Jadwal kegiatan yang berbenturan dengan kegiatan lain.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Mengidentifikasi kegiatan dan menjadwal ulang kegiatan. 2. Memberikan pemahaman dalam mematuhi anggaran kas yang sudah disusun.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	Melakukan evaluasi dan perbaikan demi kelancaran kegiatan.			

34. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
B	KEUANGAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					BPKPD
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,73	82,73	100,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
	Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	20,20	20,00	99,01	
	Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%	86,36	86,25	99,87	
	Budget execution : deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4,50	6,01	133,56	
	Cash management (Persentase anggaran)	%	15,07	11,99	79,56	
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100,00	91,69	91,69	
	Akses publiK terhadap informasi keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
	Asset management	Laporan	4,00	4,00	100,00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
	Revenue mobilization : deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	22,48	8,18	36,39	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					93,34	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	Adanya aplikasi pendukung pengelolaan keuangan yang makin berkembang.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	Belum tertatanya pengelola keuangan dan banyaknya beban kerja menjadikan kinerja tidak fokus.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	Menyelesaikan pekerjaan dengan target dan tepat waktu.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	Penyusunan renja dengan lebih baik dan terukur.			

35. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
C	KEPEGAWAIAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					BKPSDM
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,50	83,60	100,12	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
	Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan	%	1,47	3,66	248,98	
	Persentase PNS yang mengikuti assessment	%	8,00	3,06	38,25	
	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	75,00	76,33	101,77	
	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	25,00	25,21	100,84	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00	99,72	99,72	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					114,95	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	Pemberlakuan Tim Kerja menjadikan koordinasi dan pembagian tugas menjadi baik.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	Pelaksanaan beberapa kegiatan belum diketahui, karena bergantung pada kebijakan pusat.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	Kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang sudah terjadwal.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat.			

36. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Pelatihan)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
D	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					BKPSDM
	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	%	8,61	48,19	559,70	
	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	%	33,58	58,00	172,72	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					366,21	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	Pemberlakuan Tim Kerja menjadikan koordinasi dan pembagian tugas menjadi baik.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	Pelaksanaan beberapa kegiatan belum diketahui, karena bergantung pada kebijakan pusat.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	Kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang sudah terjadwal.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat.			

37. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Penelitian dan Pengembangan)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
E	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					BAPPEDA
	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah	%	44,30	53,61	121,02	
			44,30	53,61		
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					121,02	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Adanya perencanaan anggaran dan sarpras pendukung kegiatan. 2. Adanya komitmen bersama dalam mencapai tujuan organisasi. 3. Adanya koordinasi internal perangkat daerah. 4. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Koordinasi internal dan eksternal yang kurang maksimal. 2. Keterlambatan dalam pengadministrasi kegiatan. Jadwal kegiatan yang berbenturan dengan kegiatan lain.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Mengidentifikasi kegiatan dan menjadwal ulang kegiatan. 2. Memberikan pemahaman dalam mematuhi anggaran kas yang sudah disusun.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	Melakukan evaluasi dan perbaikan demi kelancaran kegiatan.			

38. Inspektorat Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
A	INSPEKTORAT DAERAH					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Inspektorat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,30	80,61	99,15	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	%	90,00	90,91	101,01	
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	94,00	95,74	101,85	
	Persentase jumlah OPD meningkat Nilai Evaluasi SAKIP	%	60,00	60,00	100,00	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
	Nilai MCP Korsupgah KPK	%	94,58	90,30	95,47	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					95,50	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, para pengambil kebijakan dan semua pihak yang terlibat dalam mendukung pencapaian kinerja yang optimal. 2. Adanya kerja sama yang baik dengan instansi vertikal yang terlibat seperti Kementerian Dalam Negeri, BPKP, BPK, KPK, Kejaksaan Negeri, Kepolisian RI, dan Badan Pusat Statistik serta pihak terkait lainnya. 3. Adanya regulasi yang mendukung serta diterapkan dengan komitmen yang kuat oleh seluruh perangkat daerah yang terlibat. 4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan baku mutu dalam pelaksanaan kegiatan.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Kurang optimalnya penyerapan anggaran di triwulan 4 karena saat pelaksanaan kegiatan ada efisiensi, sehingga perencanaan yang sudah di tetapkan dalam anggaran kas belum terlaksana secara optimal. 2. Adanya kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal seperti Kementerian Dalam Negeri, BPKP, BPK, KPK, Kejaksaan Negeri, Pihak Kepolisian, Badan Pusat Statistik, dan pihak terkait lainnya yang dalam pelaksanaannya sulit diprediksi tergantung rencana dari instansi tersebut. 3. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dikarenakan penyesuaian anggaran.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Mengoptimalkan anggaran yang sudah direncanakan agar tepat sasaran dan sesuai anggara kasnya. 2. Melaksanakan komunikasi dengan instansi vertikal seperti Kementerian Dalam Negeri, BPKP, BPK, KPK, Kejaksaan Negeri, Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta pihak terkait agar kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu. 3. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pada anggaran perubahan dengan mempersiapkan perencanaan kegiatan.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Merencanakan kegiatan dengan mengoptimalkan pagu anggaran yang ada agar kegiatan dapat berjalan optimal. 2. Merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal secara lebih optimal dengan komunikasi yang lebih intensif. 3. Melaksanakan perhitungan kebutuhan anggaran secara cermat dan efisien agar lebih optimal.			

39. Kecamatan Sidorejo

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
VII	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					
A	KECAMATAN SIDOREJO					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Kecamatan Sidorejo
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
	Persentase peningkatan skor IKM	%	0,40	0,60	150,00	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	%	65,00	100,00	153,85	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	Persentase upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kecamatan Sidorejo	%	69,00	80,37	116,47	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					120,05	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Adanya komitmen dan koordinasi yang baik.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Adanya komitmen dan koordinasi yang baik.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Melakukan evaluasi berkala dan mencermati schedule yang telah disusun.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Meningkatkan koordinasi agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana			

40. Kecamatan Argomulyo

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
VII	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					
B	KECAMATAN ARGOMULYO					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Kecamatan Argomulyo
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	85,71	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
	Persentase peningkatan skor IKM	%	1,40	6,60	485,71	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	%	90,60	53,66	21,96	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	Persentase upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100,00	100,00	0,00	
	Persentase terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	%	100,00	100,00	50,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kecamatan Sidorejo	%	63,55	93,00	88,59	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					162,83	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Tersedianya anggaran dan sumber daya manusia.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Adanya kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas, karena dokumen yang belum lengkap.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Merencanakan, mencermati dan berkoordinasi supaya kegiatan dapat tepat sesuai jadwal dan anggaran kas yang telah ditentukan.			

41. Kecamatan Tingkir

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
VII	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					
C	KECAMATAN TINGKIR					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Kecamatan Tingkir
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
	Persentase peningkatan skor IKM	%	2,05	0,10	4,88	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100,00	100,00	100,00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	Persentase upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kecamatan Sidorejo	%	83,48	64,76	77,58	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					80,41	
Predikat					TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Adanya komitmen bersama dan koordinasi yang baik dalam mencapai tujuan organisasi			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Ada kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan 3 dan 4. 2. Terdapat kegiatan yang terealisasi sesuai kebutuhan kantor.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Melakukan evaluasi berkala dan mencermati schedule yang telah disusun.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Lebih meningkatkan koordinasi agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.			

42. Kecamatan Sidomukti

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)					
VII	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					
D	KECAMATAN SIDOMUKTI					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Kecamatan Sidomukti
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
	Persentase peningkatan skor IKM	%	1,22	0,26	21,31	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100,00	100,00	100,00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	Persentase upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100,00	100,00	100,00	
	Persentase terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kecamatan Sidomukti	%	89,73	87,83	111,45	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					86,53	
Predikat					TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Tersedianya anggaran dan sumber daya manusia.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Belum adanya sinkronisasi data dengan instansi terkait.			
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Meningkatkan koordinasi dengan pengampu kegiatan.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Merencanakan, mencermati dan berkoordinasi supaya kegiatan tepat sesuai jadwal atau anggaran kas yang telah ditentukan. 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pencapaian kinerja sesuai target.			

43. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Kesbangpol
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	64,86	87,16	101,95	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCasila DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
	Persentase pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila	%	84,38	95,56	113,25	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
	Persentase pendidikan politik yang dilaksanakan	%	100,00	98,19	98,19	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWAASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
	Persentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	%	62,16	99,50	160,07	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
	Prosentase penurunan penyalahgunaan narkoba	%	8,00	0,40	5,00	
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	78,98	93,33	118,17	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
	Persentase penurunan kejadian atau konflik sosial	%	35,00	83,10	237,43	
Rata – Rata Capaian Kinerja (%)					119,15	
Predikat					SANGAT TINGGI	
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	1. Ketersediaan anggaran pendukung kegiatan. 2. Kepemimpinan yang kuat. 3. Formasi pegawai yang mendukung kegiatan. 4. Sarana dan prasarana yang memadai. 5. Budaya kerja yang mendukung kegiatan.			
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan mitra kerja. 2. Perencanaan yang kurang cermat. 3. Kurangnya kompetensi pegawai. 4. Adanya kebijakan pemerintah.			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Satuan	Target Kinerja RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. TW 4 Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025	OPD
	Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Merencanakan strategi dan jadwal pelaksanaan setiap tahap dengan tepat, meningkatkan kompetensi serta koordinasi sesuai dengan yang telah direncanakan.			
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Meningkatkan perencanaan kegiatan yang lebih cermat sesuai dengan perkembangan situasi dan yang dapat meningkatkan pencapaian kinerja, evaluasi dan penyesuaian terhadap rencana kerja yang sudah berjalan.			

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BAPPEDA

Jl. Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, Jawa Tengah 50724

Telp./Fax. : (0298) 325 332

Situs : bappeda.salatiga.go.id

Surel : bappeda@salatiga.go.id

